BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 212 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA KECAMATAN PASIRJAMBU
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Bandung Nomor 146 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 146);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN PASIRJAMBU KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
9. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan Kecamatan Pasirjambu untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan Kecamatan Pasirjambu untuk periode 1 (satu) tahunan.

12. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disebut RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan pada Kecamatan Pasirjambu serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.

Pasal 2

Renja Kecamatan Pasirjambu adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kecamatan Pasirjambu untuk periode 1 (satu) tahun berkenaan yang memuat penjabaran dari RKPD Tahun 2026 dan berpedoman pada rancangan Renstra Kecamatan Pasirjambu Tahun 2025-2029.

Pasal 3

(1) Renja Kecamatan Pasirjambu Tahun 2026 merupakan penjabaran dari rancangan Renstra Kecamatan Pasirjambu Tahun 2025-2029 yang akan digunakan Kecamatan Pasirjambu untuk melaksanakan rencana kerja Kecamatan Pasirjambu.
(2) Renja Kecamatan Pasirjambu Tahun 2026 sebagaimana pada ayat (1) bertujuan untuk:
    a. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta evaluasi hasil capaian pelaksanaan rencana kerja Kecamatan Pasirjambu tahun lalu dan capaian kinerja pelayanan Kecamatan Pasirjambu;
    b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergisitas antara Renja Kecamatan Pasirjambu dengan dokumen RKPD dan Renstra Kecamatan Pasirjambu;
    c. sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan penganggaran dengan memperhatikan kerangka regulasi dan kerangka anggaran Kecamatan Pasirjambu yang telah ditetapkan pagu dan indikatifnya; dan
    d. mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Pasal 4

(1) Renja Kecamatan Pasirjambu digunakan sebagai salah satu dasar penyusunan RKA.

(2) Renja Kecamatan Pasirjambu selanjutnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Bandung yang mengatur mengenai Renstra Kecamatan Pasirjambu Tahun 2025-2029.

BAB II
DOKUMEN RENJA KECAMATAN PASIRJAMBU

Pasal 5

(1) Isi dan uraian dokumen Renja Kecamatan Pasirjambu Tahun 2026 disusun dengan sistematika:
   a. bab I latar belakang dan dasar hukum;
   b. bab II hasil evaluasi Renja Kecamatan Pasirjambu tahun lalu;
   c. bab III tujuan dan sasaran;
   d. bab IV rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah;
   e. bab V penutup; dan
   f. lampiran program/ kegiatan/ sub kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

(2) Isi dan uraian dokumen Renja Kecamatan Pasirjambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KAIDAH PELAKSANAAN DAN PELAPORAN RENJA KECAMATAN PASIRJAMBU

Pasal 6

Kaidah pelaksanaan Renja Kecamatan Pasirjambu menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dalam Renja Kecamatan Pasirjambu meliputi:

a. semua ketetapan indikator kinerja dan pagu indikatif pendanaan menjadi tanggungjawab Kecamatan Pasirjambu sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pasirjambu;
b. target kinerja dan pagu indikatif dapat berubah menyesuaikan dengan KUAPPAS yang telah disepakati bersama DPRD;
c. perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilengkapi dengan berita acara atau risalah rapat antara Kecamatan Pasirjambu dengan DPRD; dan

d. perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada huruf c dilaksanakan pada saat penyusunan perubahan Renja Kecamatan Pasirjambu.

Pasal 7

(1) Kecamatan Pasirjambu membuat laporan realisasi kinerja dan anggaran secara berkala atas pelaksanaan Renja Kecamatan Pasirjambu.
(2) Laporan realisasi kinerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Laporan realisasi kinerja dan anggaran Renja Kecamatan Pasirjambu disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah.
(4) Laporan realisasi kinerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan masukan dan pertimbangan untuk penyusunan tahun berikutnya dan/atau perubahan Renja Kecamatan Pasirjambu tahun berjalan.
(5) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara elektronik.
(6) Dalam hal pelaporan secara elektronik terjadi kendala atau permasalahan teknis maka dapat disampaikan secara manual.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

(1) Camat Kecamatan Pasirjambu melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Pasirjambu dan evaluasi hasil Renja Kecamatan Pasirjambu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah.
(2) Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah melakukan verifikasi atas hasil pengendalian dan evaluasi yang dilakukan Kecamatan Pasirjambu terhadap pelaksanaan dan hasil Renja Kecamatan Pasirjambu.

(3) Camat Kecamatan Pasirjambu menindaklanjuti hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan Renja Kecamatan Pasirjambu.

(4) Pengendalian pelaksanaan Renja Kecamatan Pasirjambu dilakukan pada saat penyusunan RKA.

BAB V
PERUBAHAN RENJA KECAMATAN PASIRJAMBU

Pasal 9

(1) Renja Kecamatan Pasirjambu dapat diubah apabila:
   a. berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah mengacu pada perubahan RKPD;
   b. terdapat ketidaksesuaian sebagaimana hasil pengendalian dan evaluasi yang dimaksud dalam pasal 8; dan
   c. terdapat adanya penyesuaian tujuan dan sasaran Kecamatan Pasirjambu beserta target indikatornya, sebagaimana tertuang didalam Renstra Kecamatan Pasirjambu Tahun 2025-2029.

(2) Perubahan Renja Kecamatan Pasirjambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perubahan yang terdiri dari:
   a. pagu anggaran program;
   b. kegiatan dan sub kegiatan;
   c. perubahan target indikator kinerja program; dan
   d. kegiatan dan sub kegiatan yang didasarkan pada hasil pelaksanaan dan evaluasi Renja Kecamatan Pasirjambu tahun 2026.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 28 Juli 2025

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 28 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 212

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN
PASIRJAMBU TAHUN 2026

RENCANA KERJA KECAMATAN PASIRJAMBU KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia posisi Kecamatan berkedudukan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota sekaligus penyelenggara urusan pemerintahan umum. Sebagai pelaksana perangkat daerah kabupaten/kota, camat melaksanakan sebagian kewenangan bupati/wali kota yang dilimpahkan dan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum, Camat secara berjenjang melaksanakan tugas Pemerintah Pusat di wilayah Kecamatan. Dengan kedudukannya tersebut, Kecamatan mempunyai peran yang sangat strategis di kabupaten/kota, baik dari tugas dan fungsi, organisasi, sumber daya manusia, dan sumber pembiayaannya sehingga perlu pengaturan tersendiri yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan dengan Peraturan Pemerintah.

Perencanaan merupakan kunci dalam keberhasilan pembangunan yang memastikan target pembangunan beserta tahapan-tahapan dalam mencapai target menjadi lebih terarah. Perencanaan pembangunan memiliki peran utama dalam mengarahkan pembangunan menuju target yang telah ditetapkan secara efektif melalui pengalokasian sumber daya yang efisien. Melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Pusat mengatur dan menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang terintegrasi dan bersinergi antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintahan, terhadap kemajuan pembangunan wilayah. Dalam undang-undang tersebut, perencanaan pembangunan di level nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota, baik untuk perencanaan jangka panjang, menengah, maupun tahunan, dilaksanakan dan diatur dalam satu koridor dengan kesatuan tata cara perencanaan, sehingga sinkronisasi antar perencanaan pembangunan dapat terwujud.

Sejalan dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 mengatur perencanaan pembangunan internal Kabupaten Bandung dalam satu Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD). Mengacu pada amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017, pasal 11 ayat (3), salah satu rencana pembangunan yang wajib disusun perangkat daerah yaitu Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah jangka pendek satu tahun untuk menjaga sinergitas pembangunan antar waktu dan antar fungsi pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Untuk menjamin terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang tidak hanya berorientasi pada tujuan (goals), tetapi juga berorientasi kepada proses, penyusunan RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2025 secara teknis dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan dengan menggunakan metode partisipatif, target pembangunan yang ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Bandung diharapkan dapat mencerminkan aspirasi seluruh kalangan. Adapun melalui pendekatan politis, penyusunan program pembangunan dilakukan sejalan dalam mendukung visi, misi, dan program kepala daerah yang dikonsultasikan dalam pembahasan dengan DPRD untuk menghasilkan produk hukum yang mengikat bagi seluruh pemangku kepentingan. Sementara melalui pendekatan top-down dan bottom-up, rencana pembangunan dalam RKPD Kabupaten Bandung diselaraskan dalam mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan mulai dari lingkup desa, kecamatan, hingga kabupaten, yang selanjutnya hasil kesepakatannya menjadi daftar usulan pada Musrenbang provinsi dan nasional. Dalam pelaksanaannya, proses perencanaan pembangunan Kabupaten Bandung dilakukan dengan menggunakan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah untuk memungkinkan proses perencanaan menjadi lebih efisien. Melalui sistem tersebut, pengajuan usulan desa dan kecamatan beserta proses verifikasi dapat dilaksanakan dari jarak jauh dengan berbasis internet. Selain dari pada itu penggunaan aplikasi ini menjadikan perencanaan lebih transparan sebab memungkinkan pengawasan untuk dilakukan pada keseluruhan tahapan proses, sehingga hasil perencanaan dapat lebih akuntabel.

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 25 ayat (6) menyebutkan bahwa Bupati/Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum pada tingkat Kecamatan melimpahkan sebagian pelaksanaannya kepada camat untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kecamatan dan mengoptimalkan pelayanan publik di Kecamatan sebagai perangkat daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat.

Penyelenggaraan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diharapkan dalam penyelengaraan Pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dapat mendorong terhadap capaian kinerja yang optimal dengan memberikan kontribusi terhadap capaian kinerja Pemerintah Kabupaten,

Dalam rangka memberikan acuan terhadap terhadap pengukuran kinerja yang memberikan gambaran terhadap capaian Kinerja, Rencana Kerja (Renja) merupakan Dokumen Penting dan strategis sehingga menjadi variabel dari penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Disamping itu, isu strategis dan potensi yang ada sangat diperhatikan dalam penyusunan Rencana Kerja tahun 2026.

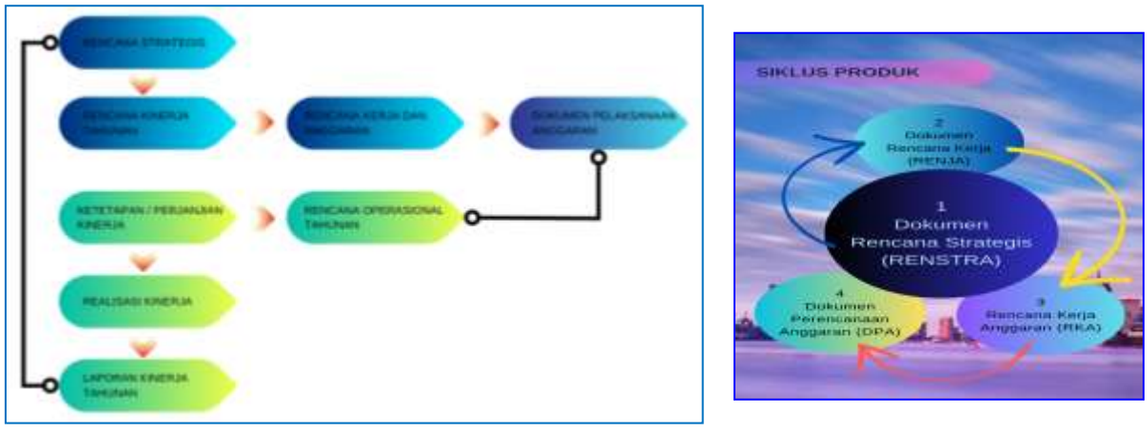
Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah (PD) yang memuat Program dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan uraian yang lebih terinci dari Rencana Strategis PD. Rencana Kerja PD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung sebagai salah satu PD di Kabupaten Bandung, telah Menyusun Rencana Kerja satu tahun ke depan (Tahun Anggaran 2026) yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2025-2029, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala.

Rencana Kerja tersebut ditindaklanjuti dengan penyusunan kegiatan untuk mewujudkan kinerja aparatur Pemerintah dan kelembagaan Pemerintah Kabupaten Bandung yang akomodatif terhadap tuntutan masyarakat akan pelayanan yang mudah, cepat, transparan dan akuntabel dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan. yang merupakan organisasi perangkat daerah, perlu bersinergi dengan Visi dan Misi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. Hal ini

dimaksudkan agar Visi dan Misi Kabupaten Bandung dapat dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah, termasuk Kecamatan Pasirjambu.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dokumen Renja adalah penjabaran dari Dokumen Renstra yang berpedoman pada RKPD Tahun 2026.



Gambar 1.1 Kedudukan Renja dalam Manajemen Strategis Sektor Publik

Dari gambar 1.1 di atas, Penyusunan Rencana Kinerja meliputi Penyusunan sasaran (uraian, indikator, dan target) yang ingin dicapai dalam tahun bersangkutan, serta program, kegiatan yang direncanakan mendukung pencapai an tujuan dan sasaran. Sasaran yang dimaksud dalam rencana kinerja ini adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam Dokumen Renstra, selanjutnya diidentifikasi sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun bersangkutan beserta indikator dan rencana tingkat capaiannya (targetnya).

Selanjutnya Rencana Kinerja yang disusun menjadi dasar dalam Penyusunan Renja Kerja dan Anggaran (RKA). Setelah anggaran ditetapkan melalui mekanisme pembahasan antara pemerintah dengan DPRD menjadi (Dokumen Pelaksanaan Anggaran / DPA), maka instansi pemerintah membuat rencana operasional, dan selanjutnya membuat Perjanjian Kinerja / Penetapan Kinerja dengan atasannya langsung, di mana penetapan kinerja ini akan digunakan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi kinerja.

Penetapan kinerja merupakan pedoman dasar bagi Aparatur Sipil Negara untuk melaksanakan kinerja apa yang akan dilakukan di tahun berjalan. Sasaran, target serta anggaran yang dapat diserap untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan kinerja yang diperjanjikan.

Pada akhir periode dilakukan pengukuran kinerja untuk selanjutnya dilaporkan dalam Laporan Kinerja Tahunan Instansi Pemerintah (LKIP). Dokumen LKIP ini akan menjelaskan kesesuaian antara kinerja yang diperjanjikan dengan realisasi kinerja serta penyerapan anggaran. Evaluasi kinerja pada Dokumen LKIP menjadi hal yang penting untuk menyusun rencana aksi selanjutnya yang mendukung pelaksanaan Renstra di tahun mendatang.

Proses Penyusunan Renja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut Penyusunan Dokumen RKPD dan Renja PD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.

Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang Rancangan Akhir RKPD dan Rancangan Akhir Renja PD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan program dan kegiatan PD, rencana serta aspirasi masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Bandung.

RKPD Kabupaten Bandung sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, yang dilanjutkan dengan Renja PD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan Renja PD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, kerangka ekonomi Daerah dan program kegiatan Perangkat Daerah. Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang mendasari Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan EvaluasiPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang PedomanPembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Renja Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutkahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 27 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 27);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung Tahun 2005-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 9);
23. Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022Nomor 1);

24. Peraturan Bupati Bandung Nomor 39 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 39);
25. Peraturan Bupati Bandung Nomor 124 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung Tahun 2021 – 2026(Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 124);
26. Peraturan Bupati Bandung Nomor 75 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun2023 Nomor 75);
27. Keputusan Bupati Bandung Nomor 137.1/Kep.615-KSOTDA/2019 tentangPelimpahan Sebagian Kewenangan dari Bupati Bandung Kepada Camat.
28. Keputusan Bupati bandung Nomor : 050 / Kep.107-Bappelitbangda / 2023 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung Tahun 2026 dimaksudkan untuk :

1. Menyempurnakan Rancangan Renja Kecamatan Pasirjambu;
2. Memastikan rancangan perencanaan, pemilihan program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan arah kebijakan dalam pencapaian visi dan misi pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD, Renstra, dan RKPD;
3. Sebagai alat ukur untuk mengukur capaian kinerja Kecamatan Pasirjambu.

Tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung Tahun 2026 bertujuan untuk :

1. Mengevaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2025 sebagai bahan Penyusunan Renja Kecamatan Pasirjambu Tahun 2026;
2. Merumuskan rancangan program, kegiatan dan sub kegiatan, termasuk indikator kinerja, target kinerja Kecamatan Pasirjambu yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026.
3. Merancang acuan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Camat Pasirjambu dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung Tahun 2026 disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Akhir Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pasal 126 Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengertian, proses penyusunan, keterkaitan antara Renja PD Kecamatan Pasirjambu dengan Dokumen RKPD, Renstra Kecamatan Pasirjambu dengan Renja K/L dan Renja Provinsi serta tindak lanjut dengan proses Penyusunan RAPBD

1.2 Landasan Hukum

Penjelasan UU, PP, PERDA dan Peraturan lain yang mengatur SOTK, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan

1.3 Maksud dan Tujuan

Penjelasan maksud dan tujuan dari Penyusunan PerubahanRenja

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN PASIRJAMBU TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Pasirjambu Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Pasirjambu.

Kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan renja Kecamatan Pasirjambu tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan, dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kecamatan Pasirjambu berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Kecamatan Pasirjambu tahun-tahun sebelumnya (Sajikan Tabel T-C.29 (PMDN 86/17)

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pasirjambu

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Pasirjambu berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM maupun terhadap IKK sesuai dengan PP nomor 6 tahun 2008, (Sajikan Tabel T-C.30).

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Pasirjambu

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD (Lampirkan Tabel T-C.31)

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (Sajikan Tabel T-C.32)

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN PASIRJAMBU

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait tupoksi Kecamatan Pasirjambu

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Pasirjambu

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pasirjambu yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja renstra Kecamatan Pasirjambu

3.3 Program dan Kegiatan

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan (misal : pencapaian visi misi kepala daerah, pencapaian NSPK dan SPM, pengentasan kemiskininan, pengembangan daerah terisolir, dst)
b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan yang meliputi :
   - Jumlah program dan jumlah kegiatan
   - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan
   - Total kebutuhan dana / pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya
c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan Renstra yang menjadi bahan Rancangan Akhir PerubahanRKPD baik jenis program / kegiatan, pagu indikatif maupun keduanya. (Sajikan Tabel T-C.33)

BAB IV RENJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

Lampiran-Lampiran

Berisi SK Tim Penyusun Renja, dan lampiran-lampiran lainnya.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN PASIRJAMBU TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Pasirjambu Tahun 2024 dan Capaian Renstra Kecamatan Pasirjambu Tahun 2024

Dalam pelaksanaan Renja Kecamatan Pasirjambu di Tahun 2024 dapat mencapai target baik secara kinerja maupun secara serapan anggaran. Kecamatan Pasirjambu pada Renja Tahun 2024 menganggarkan sebesar Rp. 5.610.104.655,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.337.390.656,00 atau 95,14%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 6 Program yang terdiri dari : 16 Kegiatan dan 45 Sub Kegiatan yang difokuskan pada 3 Target Sasaran Utama. Adapun data capaian kinerja Tahun 2024, tersaji pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1 Hasil Pengukuran atas Indikator
Kinerja Utama Kecamatan Pasirjambu

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2023		TAHUN 2024		PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2024	PERSENTASE PERTUMBUHAN CAPAIAN ANTARA 2023 DAN 2024
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,00	90.87	86,00	91,70	106,63	Naik (0,91%)

Sumber data Dokumen LKIP tahun 2024

Dari Tabel 2.1 diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Kecamatan Pasirjambu sebesar 106,63%.

Tabel 2.2 TC.29 - Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kabupaten Bandung

Kode Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (s/d Juli Tahun 2024)						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2025)			
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan																		
1					2	3	4		5		6		7		8 =(7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
7	01	1	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1. NILAI AKIP 2. PERSENTASE BMD DALAM KONDISI BAIK	70,00 98,50	Point Persen	73,80 93,15	Point Persen	69,00 98,50	Point Persen	80,40 99,96	Point Persen	116,52 101,48	Point Persen	69,50 98,50	Point Persen		Point Persen		Point Persen
						1. Nilai AKIP	70,00	Point	73,80	Point	69	Point	80,40	Point	116,52	Point	69,50	Point		Point		Point
7	*01*	*1*	*2.01*	*0*	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Persentase ketersediaan dokumen sesuai dengan perencanaan dan evaluasi*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100,00*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*
7	01	1	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27	Dokumen	6	Dokumen	6	Dokumen	6	Dokumen	100,00	Persen	3	Dokumen	15	Dokumen	55,56	Persen
7	01	1	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	100,00	Persen	3	Dokumen	9	Dokumen	60,00	Persen
7	01	1	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	20	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	100,00	Persen	4	Dokumen	12	Dokumen	60,00	Persen
7	01	1	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	10	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100,00	Persen	2	Dokumen	6	Dokumen	60,00	Persen

Kode Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (s/d Juli Tahun 2024)						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2025)			
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan																		
1					2	3	4		5		6		7		8 =(7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
7	01	1	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	20	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	100,00	Persen	3	Dokumen	9	Dokumen	45,00	Persen
7	01	1	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15	Laporan	3	Laporan	3	Laporan	3	Laporan	100,00	Persen	3	Laporan	9	Laporan	60,00	Persen
7	01	1	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
7	01	1	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen									1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	Persen
7	01	1	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	10	Data									10	Data	10	Data	100,00	Persen
7	*01*	*1*	*2.02*	*0*	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Prosentase ketersediaan dokumen anggaran/ keuangan yang diselesaikan tepat waktu*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100,00*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*
7	01	1	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	Orang / Bulan	12	Orang / Bulan	12	Orang / Bulan	12	Orang / Bulan	100,00	Persen	12	Orang / Bulan	36	Orang / Bulan	60,00	Persen
7	01	1	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10	Laporan	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Laporan	100,00	Persen	2	Laporan	6	Laporan	60,00	Persen

Kode Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (s/d Juli Tahun 2024)						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2025)			
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan																		
1					2	3	4		5		6		7		8 =(7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
7	01	1	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD	20	Laporan	4	Dokumen	4	Dokumen	4	Laporan	100,00	Persen	4	Laporan	12	Laporan	60,00	Persen
7	01	1	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	20	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	100,00	Persen	4	Dokumen	12	Dokumen	60,00	Persen
7	*01*	*1*	*2.05*	*0*	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Persentase rata-rata capaian SKP ASN*	*100*	*Persen*		*Persen*		*Persen*		*Persen*		*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*		*Persen*
7	01	1	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		Paket		Paket		Paket		Paket	#DIV/0!	Persen		Paket	0	Paket	#DIV/0!	Persen
7	01	1	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	9	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	Persen	3	Dokumen	5	Dokumen	55,56	Persen
7	01	1	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40	Orang		Orang		Orang		Orang	#DIV/0!	Persen	0	Orang	40	Orang	100,00	Persen
7	01	1	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	45	Orang		Orang		Orang		Orang	#DIV/0!	Persen	0	Orang	45	Orang	100,00	Persen
7	*01*	*1*	*2.06*	*0*	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Persentase rata-rata pemenuhan administrasi umum perangkat daerah*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100,00*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*
7	01	1	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60	Paket	12	Paket	12	Paket	12	Paket	100,00	Persen	12	Paket	36	Paket	60,00	Persen

Kode Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (s/d Juli Tahun 2024)						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2025)			
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan																		
1					2	3	4		5		6		7		8 =(7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
7	01	1	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30	Paket	6	Paket	6	Paket	6	Paket	100,00	Persen	6	Paket	18	Paket	60,00	Persen
7	01	1	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	50	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	100,00	Persen	10	Paket	30	Paket	60,00	Persen
7	01	1	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	100,00	Persen	20	Paket	60	Paket	60,00	Persen
7	01	1	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60	Paket	12	Paket	12	Paket	12	Paket	100,00	Persen	12	Paket	36	Paket	60,00	Persen
7	01	1	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	58	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100,00	Persen	10	Laporan	34	Laporan	58,62	Persen
7	*01*	*1*	*2.08*	*0*	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100,00*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*
7	01	1	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	Laporan		Laporan		Laporan		Laporan	#DIV/0!	Lembar	0	Laporan	0	Laporan	#DIV/0!	Persen
7	01	1	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100,00	Persen	12	Laporan	36	Laporan	60,00	Persen
7	01	1	2.08	0003	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100,00	Persen	12	Laporan	36	Laporan	60,00	Persen
						2. Prosentase BMD Dalam Kondisi Baik	98,50	Point	73,80	Point	69,00	Point	80,40	Point	116,52	Point	98,50	Point		Point		Point

Kode Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (s/d Juli Tahun 2024)						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2025)			
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan																		
1					2	3	4		5		6		7		8 =(7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
7	*01*	*1*	*2.03*	*0*	*Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	*Persentase Penyediaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*
7	01	1	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100,00	Persen	1	Laporan	3	Laporan	75,00	Persen
7	*01*	*1*	*2.07*	*0*	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Prosentase BMD Dalam Kondisi Baik*	*98,50*	*Point*	*98,50*	*Point*	*98,50*	*Point*	*93,15*	*Point*	*94,57*	*Point*	*98,50*	*Point*	*98,50*	*Point*	*93,17*	*Point*
7	01	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15	Unit	3	Jenis	3	Jenis	3	Unit	100,00	Jenis	3	Unit	9	Unit	60,00	Persen
7	*01*	*1*	*2.09*	*0*	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Prosentase BMD Dalam Kondisi Baik*	*98,50*	*Point*	*98,50*	*Point*	*98,50*	*Point*	*93,15*	*Point*	*94,57*	*Point*	*98,50*	*Point*	*91,77*	*Point*	*93,17*	*Point*
7	01	1	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	31	Unit	5	Unit	5	Unit	5	Unit	100,00	Persen	7	Unit	17	Unit	54,84	Persen
7	01	1	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	31	Unit	5	Unit	5	Unit	5	Unit	100,00	Persen	5	Unit	15	Unit	48,39	Persen
7	01	1	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	10	Unit	2	Unit	2	Unit	2	Unit	100,00	Persen	2	Unit	6	Unit	60,00	Persen
7	01	1	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2	Unit		Unit		Unit		Unit	#DIV/0!	Persen	0	Unit	0	Unit	-	Persen

Kode Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (s/d Juli Tahun 2024)						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2025)			
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan																		
1					2	3	4		5		6		7		8 =(7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
						INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)	88,00	Point	90,87	Point	86,00	Point	91,70	Point	106,63	Point	87,00	Point		Point		Point
7	01	2	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)	88,00	Point	90,87	Point	86,00	Point	91,70	Point	106,63	Point	87,00	Point		Point		Point
7	*01*	*2*	*2.03*	*0*	*Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum*	*Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100,00*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*
7	01	2	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	4	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	Persen	1	Dokumen	3	Dokumen	75,00	Persen
7	01	2	2.03	0002	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta																	
7	*01*	*2*	*2.04*	*0*	*Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat*	*Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100,00*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*
7	01	2	2.04	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah dokumen non perizinan usaha yang dilaksanakan	8	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	1	Dokumen	50,00	Persen	1	Dokumen	4	Dokumen	50,00	Persen

Kode Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (s/d Juli Tahun 2024)						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2025)			
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan																		
1					2	3	4		5		6		7		8 =(7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
7	01	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	60	Laporan	3	Laporan	3	Laporan	3	Laporan	100,00	Persen	27	Laporan	33	Laporan	55,00	Persen
						PERSENTASE DESA BERADMINISTRASI BAIK	67,00	Point	73,50	Point	66,00	Point	75,10	Point	113,79	Point	66,50	Point		Point		Point
7	01	3	0	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100,00	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen
7	*01*	*3*	*2.01*	*0*	*Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*	*Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100,00*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*
7	01	3	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa	40	Lembaga kemasyarakatan	12	Lembaga kemasyarakatan	12	Lembaga kemasyarakatan	12	Lembaga kemasyarakatan	100,00	Persen	12	Lembaga kemasyarakatan	36	Lembaga kemasyarakatan	90,00	Persen
7	01	3	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	60	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100,00	Persen	12	Laporan	14	Laporan	23,33	Persen
7	*01*	*3*	*2.03*	*0*	*Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dilaksanakan oleh Kecamatan bagi Pemerintah Kota yang Tidak Memiliki Desa)*	*Persentase Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100,00*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*

Kode Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (s/d Juli Tahun 2024)						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2025)			
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan																		
1					2	3	4		5		6		7		8 =(7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
7	01	3	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	40	Lembaga kemasyarakatan	10	Lembaga kemasyarakatan	12	Lembaga kemasyarakatan	12	Lembaga kemasyarakatan	100,00	Persen	4	Lembaga kemasyarakatan	26	Lembaga kemasyarakatan	65,00	Persen
7	01	3	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah laporan fasilitas pengembangan usaha ekonomi masyarakat	4	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100,00	Persen	1	Laporan	3	Laporan	75,00	Persen
7	01	3	2.03	0005	Fasilitasi Pemanpaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pemanpaatan Teknologi Tepat Guna	3	Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan		Persen	1	Kegiatan	1	Kegiatan	33,33	Persen
7	*01*	*3*	*2.06*	*0*	*Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan*	*Persentase capaian program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan*	*100*	*Persen*									*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*
7	01	3	2.06	0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	10	Keluarga									10	Keluarga	10	Keluarga	100,00	Persen
7	01	3	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan KelompokMasyarakat	10	Keluarga									10	Keluarga	10	Keluarga	100,00	Persen
7	01	3	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti PeningkatanKetahanan Pangan Keluarga	10	Keluarga									10	Keluarga	10	Keluarga	100,00	Persen

Kode Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (s/d Juli Tahun 2024)						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2025)			
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan																		
1					2	3	4		5		6		7		8 =(7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
7	01	3	2.06	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	10	Keluarga									10	Keluarga	10	Keluarga	100,00	Persen
7	01	3	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	10	Keluarga									10	Keluarga	10	Keluarga	100,00	Persen
7	01	3	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yangBerkualitas dan Berdaya Saing	10	Keluarga									10	Keluarga	10	Keluarga	100,00	Persen
7	01	3	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	10	Keluarga									10	Keluarga	10	Keluarga	100,00	Persen
7	01	3	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	10	Keluarga									10	Keluarga	10	Keluarga	100,00	Persen

Kode Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (s/d Juli Tahun 2024)						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2025)			
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan																		
1					2	3	4		5		6		7		8 =(7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
7	01	3	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	10	Keluarga									10	Keluarga	10	Keluarga	100,00	Persen
7	01	3	2.06	0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti PelatihanKeluarga Tanggap Bencana Alam	10	Keluarga									10	Keluarga	10	Keluarga	100,00	Persen
7	01	3	2.06	0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti PelatihanKeluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	10	Keluarga									10	Keluarga	10	Keluarga	100,00	Persen
7	01	3	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan MenujuKeluarga Berkualitas	10	Keluarga									10	Keluarga	10	Keluarga	100,00	Persen
						INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)	88,00	Point	90,87	Point	86,00	Point	91,70	Point	106,63	Point	87,00	Point		Point		Point
7	01	4	0	0	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE PENEGAKAN PERDA YANG BERKAITAN DENGAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen		Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen
7	01	4	2.01	0	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100,00*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*

Kode Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (s/d Juli Tahun 2024)						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2025)			
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan																		
1					2	3	4		5		6		7		8 =(7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
7	01	4	2.01	0001	Koordinasi Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100,00	Persen	1	Laporan	3	Laporan	75,00	Persen
7	01	4	2.02	0002	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100,00	Persen	1	Laporan	3	Laporan	75,00	Persen
7	*01*	*4*	*2.02*	*0*	*Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah*	*Persentase pemeliharaan kantrantibmas dan penceqahan tindak kriminal*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100,00*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*
7	01	4	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah laporan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	60	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	100,00	Persen	4	Laporan	12	Laporan	20,00	Persen
7	01	5	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE CAPAIAN KEBERHASILAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG DITUGASKAN KEPALA DAERAH	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen		Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen
7	*01*	*5*	*2.01*	*0*	*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*	*Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100,00*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*

Kode Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (s/d Juli Tahun 2024)						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2025)			
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan																		
1					2	3	4		5		6		7		8 =(7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
7	01	5	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	210	Orang	60	Orang	60	Orang	60	Orang	100,00	Persen	50	Orang	170	Orang	80,95	Persen
7	01	5	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan persatuan dan kesatuan Bangsa	400	Orang		Orang		Orang		Orang		Persen	100	Orang	100	Orang	25,00	Persen
7	01	5	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan kerukunan antara suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional	1200	Orang	300	Orang	300	Orang	300	Orang	100,00	Persen	300	Orang	900	Orang	75,00	Persen
7	01	5	2.01	0005	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100,00	Persen	1	Laporan	3	Laporan	75,00	Persen
7	01	5	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	Persen	1	Dokumen	3	Dokumen	75,00	Persen
						PERSENTASE DESA BERADMINISTRASI BAIK	67,00	Point	73,50	Point	66,00	Point	75,10	Point	113,79	Point	66,50	Point		Point		Point
7	01	6	0	0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE DESA YANG DIBINA DAN DIAWASI	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen		Persen	100	Persen	100	Persen		Persen
7	*01*	*6*	*2.01*	*0*	*Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	*Persentase Desa yang dibina*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100,00*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*

Kode Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (s/d Juli Tahun 2024)						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2025)			
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan																		
1					2	3	4		5		6		7		8 =(7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
7	01	6	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	40	Dokumen	10	Dokumen	10	Dokumen	10	Dokumen		Persen	1	Dokumen	21	Dokumen	52,50	Persen
7	01	6	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	60	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	100,00	Persen	12	Dokumen	36	Dokumen	60,00	Persen
7	01	6	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	10	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	Persen	0	Dokumen	2	Dokumen	20,00	Persen
7	01	6	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	50	Dokumen	10	Dokumen	10	Dokumen	10	Dokumen	100,00	Persen	3	Dokumen	23	Dokumen	46,00	Persen

Pasirjambu, 20 April 2026
CAMAT PASIRJAMBU

NIA KANIA, S.PT., M.I.L
NIP. 19780927 201001 2 008

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pasirjambu

Kecamatan Pasirjambu berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Adapun rincian tugas pokok Kecamatan Pasirjambu yaitu memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan tugas umum pemerintahan serta urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan di wilayah Kecamatan Pasirjambu.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Kecamatan Pasirjambu dituntut untuk melaksanakan fungsi yang sekaligus menjadi pelayanan perangkat daerah kewilayahan yaitu:

a. perumusan, pengaturan, pengkoordinasikan, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan umum dan teknis operasional bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, pembangunan dan sosial budaya;
b. penyelenggaraan pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, pembangunan dan sosial budaya;
c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Kecamatan.

Selain 4 (empat) fungsi tersebut, Kecamatan Pasirjambu melaksanakan pelimpahan kewenangan dari Bupati Bandung untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat pada Kecamatan Pasirjambu. Pelimpahan kewenangan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bandung Nomor 137.1/Kep.615-KSOTDA/2019 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat yang telah diubah dengan Keputusan Bupati nomor 137.1/Kep.467-Tapem/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati nomor 137.1/Kep.615-KSOTDA/2019 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat. Pelimpahan kewenangan tersebut bersifat mandat yang terdiri dari 16 (enam belas) urusan dan 28 (dua puluh

delapan) pelimpahan. Adapun rincian pelimpahan sebagian urusan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat dapat dilihat sebagaimana Tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 2.3 Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
1.	Pendidikan	1. Fasilitasi keikutsertaan warga masyarakat dalam pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan kesetaraan
		2. Monitoring dan fasilitasi kelayakan sarana dan prasarana pendidikan dasar di wilayah kecamatan
2.	Kesehatan	3. Fasilitasi penanggulangan masalah kesehatan masyarakat tingkat kecamatan
		4. Monitoring dan fasilitasi kelayakan sarana dan prasarana Puskesmas, Poskesdes, dan Puskesmas Pembantu di wilayah kecamatan
3.	Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	5. Fasilitasi pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
4.	Sosial	6. Penanganan pertama penyediaan kebutuhan dasar mendesak masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
5.	Pemberdayaan Perempuan DanPerlindungan Anak	7. Penyelenggaraan pembinaan organisasi perempuan tingkat kecamatan
		8. Monitoring dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan perlindungan terhadap Perempuan dan anak dari tindak kekerasan
6.	Pertanahan	9. Fasilitasi penyelenggaraan pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum
7.	Lingkungan Hidup	10. Pengelolaan sampah skala kecamatan
		11. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) skala kecamatan
		12. Fasilitasi pembinaan desa/kelurahan berbudaya lingkungan
		13. Fasilitasi pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
8.	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	14. Monitoring dan fasilitasi penyelenggaraan layanan dan kelayakan sarana prasarana yang digunakan dalam pelayanan dokumen kependudukan dan catatan sipil
9.	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	15. Pelantikan Kepala Desa hasil pemilihan, Pergantian Antar Waktu dan Penjabat Kepala Desa
10.	Komunikasi Dan Informatika	16. Monitoring dan fasilitasi kelayakan akses jaringan internet lingkungan kantor Kecamatan, Desa/Kelurahan dan fasilitas umum di wilayah kecamatan
11.	Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	17. Fasilitasi pengembangan koperasi dan UMKM skala kecamatan
		18. Promosi produk unggulan UMKM skala

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
		kecamatan
12.	Penanaman Modal	19. Fasilitasi dan pendampingan pengajuan Nomor Induk Berusaha (NIB)
		20. Monitoring kegiatan pemanfaatan tanah sesuai perizinan yang diterbitkan di wilayah kecamatan
13.	Kepemudaan Dan Olahraga	21. Pembinaan keolahragaan tingkat kecamatan
		22. Pembinaan kepemudaan tingkat kecamatan
14.	Kebudayaan	23. Pemajuan seni dan budaya tingkat Kecamatan
		24. Penyelenggaraan pagelaran seni dan budaya tingkat kecamatan
15.	Pariwisata	25. Pengembangan potensi dan budaya lokal tingkat kecamatan sebagai destinasi wisata
		26. Fasilitasi pengembangan desa wisata dan kampung wisata
		27. Pengembangan ekonomi kreatif bidang pariwisata skala Kecamatan
16.	Pertanian	28. Monitoring dan fasilitasi kelayakan sarana dan prasarana pertanian

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut diukur dari pencapaian sasaran strategis dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja pemerintahan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Penetapan IKU secara teknis dirumuskan untuk acuan ukuran kinerja yang digunakan dalam menyusun target kinerja pada Renja tahunan. Indikator Tujuan digunakan untuk Indikator Kinerja IKU Tahun 2025-2029, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 2.1 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pasirjambu Tahun 2025-2029

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bandung. Selanjutnya sebagai perwujudan transparansi kinerja Kecamatan Pasirjambu telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan antara Camat Pasirjambu dengan Bupati Bandung.

Adapun Tingkat Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pasirjambu yang berdasarkan pada Indikator Target Renstra Tahun 2021-2026 dan Realisasi Capaian tahun kebelakang termasuk proyeksi tahun berjalan, disajikan pada Tabel TC.30 berikut ini :

Tabel 2.4 - TC. 30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pasirjambu

NO	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun				Tahun		Tahun		
				2022	2023	2024	2026	2023	2024	2026	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	11	11	13	13	14
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)		73,80	67,77	68,45	69,00	69,50	73,80	80,40	82,60 (Nilai Prediksi)	85,10 (Nilai Prediksi)	Realisasi capaian didasarkan pada LHE Inspektorat, No. Realisasi pencapaian ini merupakan hasil dari kerjasama dan sinergitas antara pimpinan dan bawahan dalam mengimplementasikan akuntabilitas kinerja baik pada bidang sektoral maupun pada bidang kesekretariatan, itupun masih terdapat kekurangan dan kelemahan yang harus segera diselesaikan. Secara garis besar, kekurangan yang harus diselesaikan / ditindaklanjuti diantaranya pada aspek penyelarasan antara perencanaan kinerja dengan pelaksanaan kinerja yang diiringi evaluasi internal sehingga dapat memberikan alternatif perbaikan pada pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan.

NO	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun				Tahun		Tahun		
				2022	2023	2024	2026	2023	2024	2026	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	11	11	13	13	14
2	Prosentase BMD/ Aset Dalam Kondisi Baik		93,15	98,50	98,50	98,50	98,50	93,15	99,96	99,98 (Nilai Prediksi)	100,00 (Nilai Prediksi)	Pengelolaan BMD di Kecamatan Pasirjambu masih terdapat dan ketemukan permasalahan, yaitu : 1. Kurang lengkapnya data jumlah, ,nilai, kondisi, dan status kepemilikan BMD. Permasalahan ini terkait dengan identifikasi dan inventarisasi. 2. Belum tersedianya basis data internal terintegerasi yang akurasi dan validitasnya dapat dipertanggungjawabkan untuk keperluan Penyusunan Perubahanneraca Pemerintah Daerah. 3. Terdapatnya perbedaan persepsi diantara pemangku kepentingan dalam hal pengelolaan BMD. Selain permasalahan-permaslahan tersebut diatas, penurunan tersebut juga disebabkan belum dilakukannya penghapusan barang yang telah habis masa pakai. Dan barang-barang yang nilainya kurang dari Rp. 500.000,00 belum dilakukan reklasifikasi. Sebagai upaya penyeleasaian masalah- masalah diatas, pada tahun 2023 Pemerintah Kecamatan Pasirjambu merencanakan langkah strategis dalam rangka peningkatan Persentase BMD Dalam Kondisi Baik, yaitu : 1. Pembuatan bank data informasi barang yang dapat diakses baik secara online maupun offline untuk kemudahan aksesibilitas terhadap data BMD. 2. Pembentukan tim khusus untuk penyelesaian tertib administrasi dan penggunaan BMD dan penyelesaian reklasifikasi barang. 3. Pembenahan sarana gudang tempat menampung asset.
3	Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM)		90,87	84,00	85,00	86,00	87,00	90,87	91,70	93,40 (Nilai Prediksi)	95,80 (Nilai Prediksi)	Pencapaian ini masih dalam proses penilaian dan merupakan hasil dari perencanaan efektivitas serapan anggaran dan kekompakan dalam pelaksanaan pekerjaan baik pada level Struktural maupun pada level Pelaksana dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat di seluruh bidang yang menjadi kewenangan Kecamatan Pasirjambu. Selain itu, pencapaian ini adalah hasil dari kesiapan seluruh elemen

NO	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun				Tahun		Tahun		
				2022	2023	2024	2026	2023	2024	2026	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	11	11	13	13	14
												dalam menindaklanjuti keluhan dan aspirasi masyarakat.
4	Persentase Desa Beradministrasi Baik		73,50	65.00	65,50	66.00	66,50	73,50	75,10	75,60 (Nilai Prediksi)	80,20 (Nilai Prediksi)	Catatan masih dalam tahap monitoring dan evaluasi Tim yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi Desa belum sepenuhnya dijadikan bahan perbaikan dan perumusan kebijakan kedepan oleh Desa

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Pasirjambu

Kecamatan Pasirjambu berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Adapun rincian tugas pokok Kecamatan Pasirjambu yaitu memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan tugas umum pemerintahan serta urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan di wilayah Kecamatan Pasirjambu.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Kecamatan Pasirjambu dituntut untuk melaksanakan perencanaan kinerja yang efektif serta memastikan pencapaian tujuan, sasaran Kecamatan Pasirjambu melalui proses perencanaan serta monitoring dan evaluasi. Pada tabel T-C.30 telah dijelaskan pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah namun perlu digaris bawahi bahwa masih terdapat hal-hal kritis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang ditargetkan, yaitu sebagai berikut :

1) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN dan bebas dari pungli, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan tersebut dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang SAKIP, Peraturan Pererintah

Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemenintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilirtas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Aun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Bupati Bandung Nomor 7O0 / KEP 168 – INSPEKTORAT / 2024 tanggal 30 Mei 2024 tentang pembentukan Tim Evaluasi Sistem Akuntabilirtas Kinerja instansi Pemerintah (SAKIP) dilingkungan Pererintah Kabupaten Bandung Tahun 2024 dan Surat Perintat Inspektur Daerah Kabupaten Bandung Nomor 500.2.4.3/1303/lrban I tanggal 6 Juni 2024, kami telah melakukan evaluasi terhadap Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung Tahun 2024.

Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan SAKIP, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah maka perlu dilakukan suatu evaluasi atas implementasi SAKIP di Perangkat Daerahnya. Dalam rangka pelaksanaan SAKIP, Pemerintah Kabupaten Bandung telah melaksanakan evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh Inspektorat Kab. Bandung.

Pada setiap penugasan evaluasi AKIP atas implementasi SAKIP perlu dirancang desain evaluasi tersendini berupa petunjuk teknis pelaksanaan evaluasi untuk memenuhi tujuan evaluasi AKIP yang ditetapkan sesuai dengan kondisi pada saat pelaksanaan evaluasi.

Pada Tahun 2024 Inspektorat telah melakukan evaluasi atas AKIP Pemerintah Kecamatan Pasirjambu dengan tujuan :

a) Secara umum tujuan evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKI dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP. Tujuan evaluasi AKIP secara khusus dapat ditentukan setiap tahun sesuai dengan kebijakan atas implementasi SAKIP yang ditetapkan. Tujuan dan Sasaran

evaluasi sangat bergantung pada para pihak pengguna hasil evaluasi dan kebijakan pimpinan instansi/unit kerja yang diberi wewenang untuk melakukan evaluasi, dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang ada.

1. Tujuan khusus dilakukannya evaluasi AKIP setiap tahunnya adalah minimal untuk :
2. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat implementasi SAKIP
4. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja,
5. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
6. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tersebut menghasilkan output nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Berikut ini adalah tabel kategori penilaian AKIP dimaksud :

Tabel 2.5 Kriteria Penilaian Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

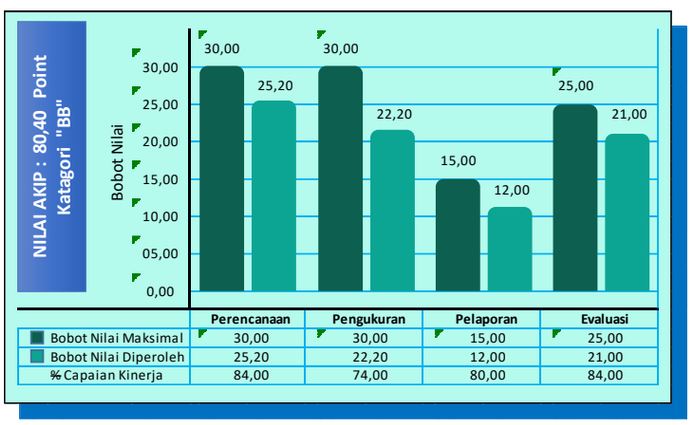
NO	KATEGORI	INTERVAL NILAI	INTERPRETASI
1.	AA	91 – 100	Sangat Memuaskan
2.	A	81 – 90	Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerjatinggi, dan sangat akuntabel
3.	BB	71 – 80	Sangat Baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4.	B	61 – 70	Baik, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan
5.	CC	51 – 60	Cukup, memadai. Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taan kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6.	C	31 – 50	Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.
7.	D	0 – 30	Sangat Kurang, sistem dan tatanan

NO	KATEGORI	INTERVAL NILAI	INTERPRETASI
			tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja. Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

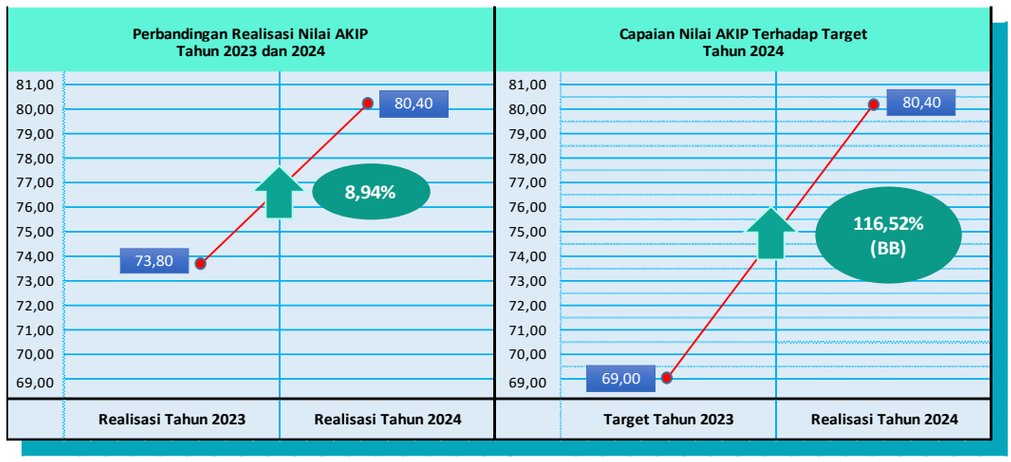
Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 komponen besar manajemen kinerja yang meliputi :

1. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja,
2. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja,
3. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja,
4. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) pada Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor : 700/291/lnspektorat, Tanggal 27 Juni 2024, Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung memperoleh Nilai Akuntabilitas Kinerja sebesar 80,40 dengan kategori “BB” Interpretasi (Sangat Baik). Dengan nilai tersebut dapat diinpretasikan bahwa Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pasirjambu sudah sangat baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja namun perlu adanya perbaikan. Untuk itu kami sajikan grafik rincian pencapaian Nilai AKIP Kecamatan Pasirjambu Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada gambar 2.2 sebagai berikut :



Gambar 2.2 Grafik Penilaian AKIP
Kecamatan Pasirjambu



Gambar 2.3 Perbandingan Realisasi Nilai AKIP
Tahun 2023 - 2024 dan Capaian Nilai AKIP Terhadap Target
Tahun 2024

Dari Gambar 2.3 terlihat bahwa perbandingan capaian Nilai AKIP Kecamatan Pasirjambu antara Tahun 2023 dan 2024 tumbuh sebesar 8,94%.

Dan capaian Nilai AKIP Tahun 2024 tercapai senilai 80,40 Point dari target yang ditentukan senilai 69,00 Point atau dengan persentase sebesar 116,52%. Kenaikan yang sangat segnifikan ini tidak terlepas dari kerjasama dan sinergitas antara pimpinan dan bawahan dalam mengimplementasikan Akuntabilitas Kinerja baik pada bidang sektoral maupun pada bidang kesekretariatan. Namun, berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat terhadap implementasi SAKIP Kecamatan Pasirjambu, pencapaian tersebut masih terdapat kekurangan-kekurangan dalam berbagai aspek yang harus diperbaiki, berikut ini kami sajikan Laporan Hasil Evaluasi Sasaran Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE SAKIP) pada Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung Tahun 2024, yaitu :

A. Kondisi berupa gambaran baik maupun catatan kekurangan tentang kondisi sebelum, sesudah, serta dampak keberhasilan pada :

1) Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 25,20 (84%), dengan kriteria sebagai berikut :

a. Keberadaan

Keberadaan dokumen perencanaan kinerja memperoleh nilai 6,00 (100%) dengan kriteria : Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja, terdapat dokurnen perencanaan kinerja jangka panjang, Terdapat dokurnen perencanaan kinerja jangka menengah, terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek, terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja dan Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.

b. Kualitas

Dokumen Perecanaan Kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting) memperoleh nilai 7,20 (80%) dengan kriteria sebagai berikut: Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan, Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu, Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan alas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai, Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai, Ukuran Keberhasilan (lndikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART, lndikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis). Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis, Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading), Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting), Setiap uniVsatuan kerja (bidang/bagian di OPD) merumuskan dan menetapkan

Perencanaan Kinerja dan Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.

c. Pemanfaatan

Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan memperoleh nilai 12,00 (80%) dengan kriteria sebagai berikut: Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai; Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai; Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih on the right track; Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selaludipantau secara berkala; Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya; Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik; Setiap uniVsatuan kerja (bidang/bagian di OPD) memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dan Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja.

Namun masih terdapat kekurangan : target yang ditetapkan dalam perencanaan Kinerja belum sepenuhnya tercapai.

2) Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 22,20 (74%) dengan kriteria sebagai berikut :

a. Keberadaan

Keberadaan dokumen pengukuran kinerja memperoleh nilai 6,00 (100%) dengan kriteria: Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja; Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja dan Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.

b. Kualitas

Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan memperoleh nilai 7.20 (80%) dengan kriteria sebagai berikut : Pimpinan selalu teribat sebagai pengambil keputusan (decision maker) dalam mengukur capaian kinerja; Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan. Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan; Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala; Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang, Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi lnformasi (Aplikasi) dan Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi lnformasi (Aplikasi).

Namun masih terdapat kekurangan :

1. Penggunaan aplikasi SIAKANG dalam pengumpulan data kinerja belum ditetapkan berupa Keputusan Bupati;
2. Penggunaan aplikasi SIDALMONEP dalam pengukuran kinerja belum ditetapkan berupa Keputusan Bupati.

c. Pemanfaatan

Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien memperoleh nilai 9,00 (60%) dengan kriteria sebagai berikut : Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja / penghasilan; Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan / penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional; Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (refocusing) organisasi; Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja; Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian kebijakan dalam mencapai

kinerja; Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja; Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja; Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja; Setiap unit satuan kerja (bidang / bagiandi OPD) memahami dan peduli alas hasil pengukuran kinerja dan Setiap pegawai memahami dan peduli alas hasil pengukuran kinerja,

3) Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja nilai 12,00 (80%), dengan kriteria sebagai berikut :

a. Keberadaan

Keberadaan dokumen pelaporan kinerja memperoleh nilai 2,40 (80%) dengan kriteria : Dokumen Laporan Kinerja telah disusun, Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala, Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan, Dokumen Laporan Kinerja telah direviu, Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan dan Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu.

b. Namun masih terdapat kekurangan : penyampaian Laporan Kinerja (LKIP) kepada Bupati Bandung tidak di/aksanakan sehingga tidak adanya surat pengantar penyampaian LKIP Tahun 2023.

c. Kualitas

Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya memperoleh nilai 3,60 (80%) dengan kriteria sebagai berikut :

d. Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuaidengan standar; Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja; Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan; Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka

menengah; Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya; Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja); Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya; Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi alas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja dan Ookumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempumaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja), namun masih terdapat catatan kekurangan : Dokumen Laporan Kinerja be/um menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan rea/isasi kinerja di level nasional (benchmark) dikarenakan tidak adanya template dari Bagian Organisasi Setda Kab Bandung tentang benchmark.

e. Pemanfaatan

Pelaporan Kinerja telahmemberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya memperoleh nilai 6,00 (80%) dengan kriteria sebagai berikut: lnformasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab); Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai; lnformasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja; lnformasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja; lnformasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam eva\uasi pencapaian keberhasilan kinerja; lnformasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya dan lnformasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal memperoleh nilai 21,00 (84%) dengan kriteria sebagai berikut :

a. Keberadaan

Keberadaan dokumen Evaluasi Akuntabilitas kinerja internal memperoleh nilai 5,00 (100%) dengan kriteria : Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal; Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja / perangkat daerah dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.

b. Kualitas

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai memperoleh nilai 6,00 (80%) dengan kriteria sebagai berikut :

c. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar; Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai; Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai; Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi lnformasi (Aplikasi),

namun masih terdapat catatan kekurangan :

1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai;
2. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum agar dilaksanakan menggunakan Teknologi lnformasi (Aplikasi).

d. Pemanfaatan

lmplementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja memperoleh nilai 10,00 (80%) dengan kriteria sebagai berikut :

Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntablitas kinerja internal telah ditindaklanjuti; Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rerkomendasi hasil evaluasi akuntablitas Kinerja internal; Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja; Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja dan Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntablitas kinerja internal.

5) Nilai Akuntabilitas Kinerja

Hasil evaluasi secara keseluruhan yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari o s.d. 100 Kantor Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung memperoleh nilai sebesar 80,40 (3,22 %) dengan kategori A lnterpretasi (Memuaskan). Nilai tersebut diperoleh dari penjabaran hasil analisis komponen penilaian yang terdiri dari Perencanaan Kinerja; Pengukuran Kinerja; Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

B. Rekomendasi atas catatan kekurangan untuk perbaikan

Terhadap permasalahan yang ditemukan dalam proses evaluasi Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah pada Kantor Kecamatan Pasirjambu Kab.Bandung, kami rekomendasikan sebagai berikut :

1. Perencanaan Kinerja

   Pemanfaatan :

   Target Kinerja yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja agar dapat dicapai sesuai dengan yang telah ditetapkan

2. Pengukuran Kinerja

   Kualitas :

   a. Penggunaan aplikasi SIAKANG dalam pengumpulan data kinerja agar ditetapkan berupa Keputusan Bupati;
   b. Penggunaan aplikasi SIDALMONEP dalam pengukuran kinerja agar ditetapkan berupa Keputusan Bupati.

3. Pelaporan Kinerja

   Keberadaan :

   Penyampaian Laporan Kinerja (LKIP) kepada Bupati Bandung agar dilaksanakan secara tepat waktu maksimal 2 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran dengan disertai surat pengatar yang ditujukan kepada Bupati.

   Kualitas :

   Dokumen Laporan Kinerja agar menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional (*benchmark*).

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

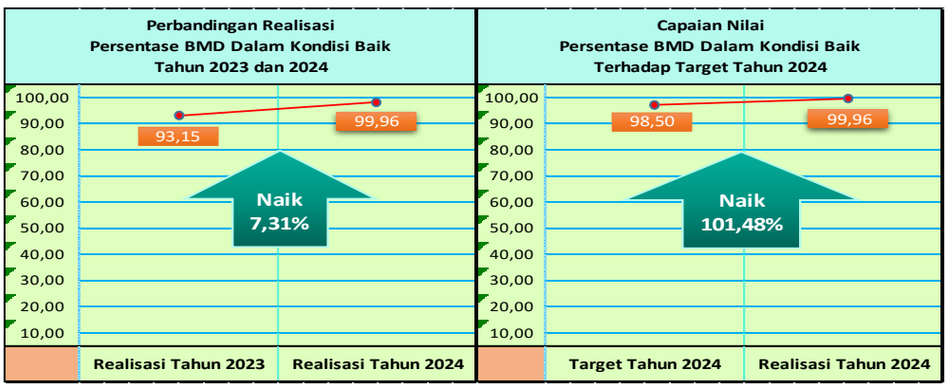
   Kualitas :

   a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai;
   b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum agar dilaksanakan menggunakan Teknologi lnformasi (Aplikasi).

2) Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam Kondisi Baik

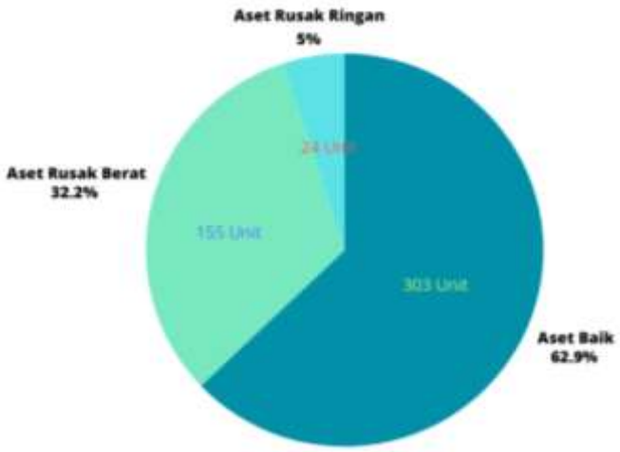
Barang dalam hal ini adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian yaitu meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi / peralatan yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang / jasa. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Barang Milik Daerah (BMD) menjadi salah satu unsur penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga harus dikelola dengan baik : akuntabel, efektif, efisien, dan ekonomis.

Berikut ini adalah capaian persentase BMD Dalam Kondisi Baik yang akan digambarkan pada gambar berikut ini :



Gambar 2.4 Perbandingan Realisasi BMD Dalam Kondisi Baik Tahun 2023 - 2024 dan Capaian Persentase BMD Dalam Kondisi Baik Terhadap Target Tahun 2024

Indikator Persentase BMD Dalam Kondisi Baik Kecamatan Pasirjambu pada Tahun 2024 memiliki target yaitu 98,50%, berhasil terealisasi dengan hasil capaian 99,96%. Meskipun telah tercapai target akan tetapi masih ada aset yang tercatat rusak berat sebanyak 155 unit atau sebanyak 32,2% belum dapat dihapuskan mengingat saat ini Kecamatan Pasirjambu sedang melaksanakan tahap penertiban aset milik daerah baik penetriban dari sisi administrasi maupun dari fisik aset-aset itu sendiri. Selain itu, terdapat aset rusak ringan sebanyak 24 unit atau 5% termasuk 2,5% aset yang masih dipakai, dari total keseluruhan aset yang masih diperlukan dalam kegiatan pekerjaan, mengingat anggaran untuk mengganti atau memperbaiki aset rusak ringan yang masih dipakai tersebut sangat terbatas sehingga barang-barang tersebut belum dapat dihapuskan. Berikut ini grafik kondisi barang milik daerah Kecamatan Pasirjambu Tahun 2023-2024.



Gambar 2.5 Grafik Kondisi Barang Milik
Daerah Tahun 2023-2024

Meski target Persentase BMD Dalam Kondisi Baik telah tercapai, Kecamatan Pasirjambu tetap berkomitmen memegang prinisip akuntabilitas dalam seluruh pelaporan sebagai wujud implementasi transparansi informasi sebagai sarana evaluasi untuk perbaikan kedepannya. Sebagai upaya penyeleasaian permasalahan, pada Tahun 2024 Pemerintah Kecamatan Pasirjambu merencanakan langkah-langkah strategis dalam rangka peningkatan Persentase BMD Dalam Kondisi Baik. Adapun langkah-langkah tersebut yaitu :

1. Menyelesaikan penertiban Aset / BMD agar prosedur penghapusan barang dengan kondisi rusak secara bertahap dapat ditempuh. Rencananya, proses ini akan selesai tahun 2026yang diakhiri dengan sensus BMD secara keseluruhan.

2. Melaksanakan sensus BMD secara keseluruhan dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana pendataan aset sehingga pembenahan aset dapat terlaksana. Dan juga output dari sensus BMD tersebut digunakan sebagai acuan dasar untuk proses rekonsilisasi aset daerah.
3. Pembentukan tim khusus untuk penyelesaian tertib administrasi dan penggunaan BMD dan penyelesaian reklasifikasi barang.

3) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Penilaian yang diberikan langsung oleh masyarakat diharapkan dapat menentukan ukuran kinerja pelayanan publik. Kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengetahui pelayanan publik adalah dengan mengukur tingkat kepuasan masyarakat. Salah satu metode yang digunakan untuk mengetahui kualitas pelayanan suatu organisasi publik adalah dengan menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Ketentuan mengenai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sendiri adalah pengukuran secara komperhensif tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung implementasi SKM dilakukan melalui sarana teknologi yang dapat mengakomodir pengisian survei secara online, yaitu aplikasi e-SKM. Jenis pelayanan dalam pelaksanaan SKM melalui e-SKM di Kecamatan Pasirjambu pada Tahun 2024 dilaksanakan dari tanggal 26 Pebruari 2024 s/d 14 Juni 2024 total pelayanan sebanyak 21 jenis pelayanan yang terakomodir baru 11 jenis pelayanan, dengan rincian jenis pelayanan sebagai berikut :

- Fasilitasi Pembuatan Kartu Keluarga
- Fasilitasi Pembuatan KTP
- Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran

- Fasilitasi Pembuatan Kartu Identitas Anak
- Rekomendasi dalam Pelaksanaan Pencairan Keuangan Desa
- Pembuatan Akta Pertanahan
- Fasilitasi Surat Keterangan Ahli Waris
- Fasilitasi Rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu
- Legalisir Dokumen
- Fasilitasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
- Penyelenggaraan Pagelaran Seni dan Budaya Tingkat Kecamatan.

Nilai IKM sementara didalam Aplikasi https://skm.bandungkab.go.id/home s/d pertanggal 14 Juni 2024 baru sebesar 88,74% dari 11 jenis pelayanan.

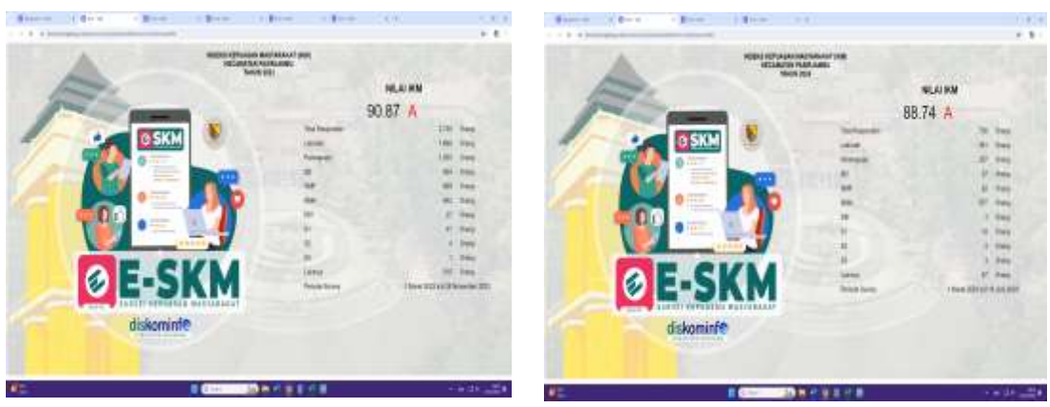
Adapun apabila hasil Survei dilakukan s/d bulan Desember Tahun 2024 diperkirakan akan mencapai Nilai sebagaimana tercantum pada gambar berikut ini :



Gambar 2.6 Capaian Nilai IKM dan Perbandingan Capaian Nilai IKM

Nilai IKM Tahun 2023
Total Responden 2.749

Nilai IKM s/d 14 Juni Tahun 2024
Total Responden 738



Gambar 2.7 Informasi Detail Responden Dalam Penilaian IKM Tahun 2023 dan IKM Tahun 2024 Kecamatan Pasirjambu

Pada Gambar 2.6 dan 2.7 terlihat ada Perbedaan Nilai IKM, itu semua disebabkan karena Nilai IKM pada Gambar 2.6 adalah Nilai Perkiraan yang akan dicapai s/d bulan Desember Tahun 2024 sedangkan pada Gambar 2.7 adalah Nilai IKM Pertanggal 14 Juni Tahun

2024 yang diambil dari Aplikasi https://skm.bandungkab.go.id/laporan/survey/DashboardIKM/null/null/NilaiIKM, apabila Nilai IKM perkiraan sesuai maka perbandingan realisasi Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 0,91% dari Tahun 2023 dan Capaian Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2024 juga mengalami kenaikan sebesar 106,63% dari Target yang telah ditetapkan sebesar 86,00 Point.

Kenaikan realisasi dan capaian Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) tersebut diraih berdasarkan beberapa paktor diantaranya kedisiplinan dan keseriusan memperbaiki kekurangan pelayanan di tahun yang lalu terutama selalu memberikan pelayanan yang ramah dan memberikan penjelasan secara rutin dan rinci kepada warga masyarakat yang akan membuat surat-surat keterangan tentang adanya beberapa mekanisme dalam hal proses pembuatan / penerbitan surat-surat keterangan yang dibutuhkan, terlihat pada Tabel 2.6 dibawah di Tahun 2023 terakomodir 25 Jenis Pelayanan dan pada Tahun 2024 baru 11 Jenis Pelayanan yang terakomodir, jadi ada 14 Jenis pelayanan yang Respondennya belum membuat layanan tersebut dalam e-SKM di Tahun 2024 akan tetapi mengingat masih panjangnya waktu dan masih berjalannnya survey diharapkan dapat menambah capaian realisasi melebihi target yang direncanakan.

Berikut ini kami sajikan beberapa perbedaan jenis layanan di e-SKM antara Tahun 2023 dan Tahun 2024 (Pertanggal 14 Juni 2024), sebagaimana terlihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 2.6 Jenis Unsur Pelayanan yang Diakomodir pada e-SKM Tahun 2023 dan Tahun 2024

No	Perbedaan Jenis Unsur Pelayanan e-SKM	
	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Rekomendasi Usul Rencana Pendirian Sekolah TK, SD, dan SMP	Fasilitasi Pembuatan Kartu Keluarga
2	Pencatatan dan Pendataan Koperasi dan UMKM	Fasilitasi Pembuatan KTP
3	Fasilitasi Pembuatan Kartu Keluarga (KK)	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran
4	Fasilitasi Pembuatan KTP	Fasilitasi Pembuatan Kartu Identitas Anak
5	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran	Rekomendasi dalam Pelaksanaan Pencairan Keuangan Desa
6	Fasilitasi Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA)	Pembuatan Akta Pertanahan
7	Rekomendasi dalam Pelaksanaan Pencairan Keuangan Desa	Fasilitasi Surat Keterangan Ahli Waris

No	Perbedaan Jenis Unsur Pelayanan e-SKM	
	Tahun 2023	Tahun 2024
8	Fasilitasi Pembuatan Surat Pindah	Fasilitasi Rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu
9	Pembuatan Akta Pertanahan	Legalisir Dokumen
10	Fasilitasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)	Fasilitasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
11	Fasilitasi Pembuatan Akta Kematian	Penyelenggaraan Pagelaran Seni dan Budaya Tingkat Kecamatan.
12	Legalisir Dokumen	
13	Rekomendasi Kartu Kerja	
14	Rekomendasi Bantuan Dana/Hibah	
15	Rekomendasi untuk Izin Pengelolaan Sarang Burung Walet, Lebah Madu, dan Budi Daya Jamur	
16	Pembuatan Surat Keterangan Lainnya	
17	Rekomendasi Pemberian Penghargaan kepada Seniman, Budayawan yang telah berjasa kepada Negara dan Daerah	
18	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Pertanahan	
19	Rekomendasi kepada Organisasi Sosial/ Panti Sosial yang berada di Desa/Kelurahan dalam hal pendaftaran baru/ ulang	
20	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pembentukan, Pemekaran, Penggabungan dan Penghapusan Desa dan Kelurahan	
21	Rekomendasi Perangkat Desa	
22	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Pembangunan antar Kecamatan/ Desa dengan Swasta dalam Skala Kabupaten di Kecamatan	
23	Rekomendasi Pembentukan Kelembagaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)	
24	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
25	Fasilitasi Surat Keterangan Ahli Waris	

Meskipun kenaikan Capaian Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Pasirjambu Tahun 2024 tidak terlalu segnifikan yaitu dari Target yang direncanakan sebesar 86,00 Point sedangkan realisasi sebesar 91,70 Point = 106,63%, ini membuktikan pelayanan Kecamatan Pasirjambu setiap tahunnya mengalami peningkatan meskipun capaian ini masih belum mengakomodir seluruh layanan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pasirjambu.

Di Tahun 2026 Kecamatan Pasirjambu menetapkan target capaian Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 92,08 Poin dan mengingat adanya beberapa penambahan jenis layanan yang diakomodir oleh e-SKM. Apabila melihat dari beberapa sumber baik

tabel maupun grafik yang telah disajikan diatas dapat disimpulkan bahwa Indikator Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Pasirjambu terus mengalami peningkatan dan telah berhasil menunjukan kinerja yang baik sehingga melebihi target yang telah ditetapkan, capaian Nilai Indek Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 sampai dengan akhir Desember 2024 mencapai Nilai sebesar 91,70 Poin.

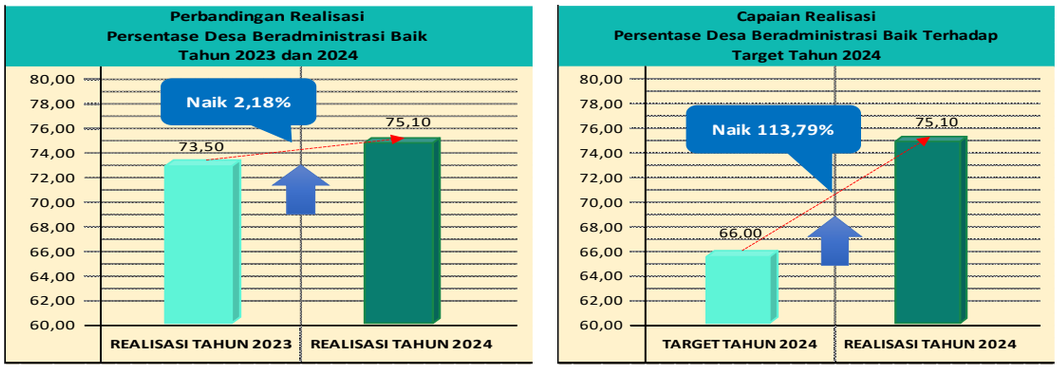
Pencapaian ini merupakan hasil dari perencanaan efektivitas serapan anggaran dan kekompakan dalam pelaksanaan pekerjaan baik pada level Struktural maupun pada level Pelaksana dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat di seluruh bidang yang menjadi tugas dan kewenangan Kecamatan Pasirjambu. Selain itu, pencapaian ini adalah hasil dari kesiapan seluruh elemen dalam mengevaluasi dan menindaklanjuti keluhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang.

4) Persentase Desa Beradministrasi Baik

Indikator Persentase Desa Beradministrasi Baik merupakan salah satu indikator yang baru masuk di Tahun 2024 dari Tujuan PD “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik” dan Sasaran Strategis Kecamatan Pasirjambu yaitu “Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa”.

Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi desa yang mampu berfungsi sebagai sumber data dan informasi serta pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat maka Persentase Desa Beradministrasi Baik dipandang perlu untuk dijadikan indikator keberhasilan dalam mensukseskan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

Adapun Nilai Persentase Desa Beradministrasi Baik Tahun 2024 ini belum final dan masih Nilai prediksi (perkiraan) dikarenakan penilainnya sampai dengan saat ini masih berjalan, akan tetapi kami perlu membanding realisasi dengan tahun sebelumnya sehingga kami memprediksi nilai Persentase Desa Beradministrasi Baik Tahun 2024 sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini :



Gambar 2.8 Capaian Persentase Desa Beradministrasi Baik Tahun 2024

Kalau dilihat dari gambar 2.8 diatas Capaian Persentase Desa Beradminiatrasi Baik mengalami peningkatan capaian sebesar 113,79% dari target yang telah ditetapkan pada Tahun 2024 sebesar 66,00 dan realisasi capaian Tahun 2024 sebesar 75,10%, kenaikan tersebut ditunjang oleh

keseriusan dan semangat kinerja TIM monitoring dan evaluasi yang selalu berkomitmen untuk lebih meningkatkan kualitas kinerjanya sehingga mendapatkan hasil yang diharapkan, meskipun dari hasil temuan monitoring dan evaluasi Tim masih ada yang belum ditindaklanjuti terutama dalam pertanggungjawaban / pengelolaan administrasi Desa dan belum sepenuhnya dijadikan bahan perbaikan dan perumusan kebijakan.

Kecamatan Pasirjambu berdasarkan hasil penelahaan visi dan misi Kepala Daerah mengemban tugas dalam penyelesaian misi ke-4 yaitu “Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang profesional, dan tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan”. Indikator-indikator yang telah dijelaskan diatas adalah ukuran yang menentukan berhasil atau tidaknya pencapaian kinerja sasaran yang secara eksplisit berdampak pada pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Bandung berdasarkan cascading kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Pasirjambu terhadap Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Bandung.

Selanjutnya, diperlukan identfikasi faktor penghambat dan pendorong terhadap pencapaian visi dan misi sebagai masukan terhadap perumusan strategi pencapaian kinerja Kecamatan Pasirjambu. Pada RKPD 2025 Kabupaten Bandung, Bupati Bandung telah mencanangkan program-program wajib untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bandung 2021-2026. Program-program tersebut dilaksanakan oleh

seluruh perangkat daerah berdasarkan tugas dan fungsinya masing-masing.

Faktor penghambat dan faktor pendorong dapat dilihat pada tabel 2.7 berikut ini :

Tabel 2.7 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Pasirjambu Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera.
Misi 4 : Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan melalui Birokrasi yang Profesional, dan Tata Kehidupan Masyarakatyang Berlandaskan Nilai-nilai Keagamaan.
Prioritas Pembangunan : Reformasi Birokrasi Integratif, Inovatif dan Dinamis

No.	Faktor	
	Penghambat	Pendorong
1	❖ Kurang optimalnya keselarasan pencapaian target realisasi kinerja dan anggaran seta tidak adanya keseragaman rumus perhitungan terutama bagi indikator tertentu	❖ Komitmen, semangat, motivasi baik, dari pimpinan yang kuat untuk mencapai target pencapaian Nilai AKIP yang lebih baik, yang tumbuh dari tahun ke tahun serta penekanan evaluasi dan tindak lanjut hasil LHE Inspektorat dengan tepat waktu.
	❖ Kurang optimalnya Penyusunan Perubahandokumen-dokumen perencanaan, baik kinerja maupun anggaran dalam bidang kesekretariatan maupun sektoral.	❖ Kemauan dan kerja keras serta Komitmen dari pimpinan yang kuat untuk membuat dan melaksanakan manajemen risiko dalam pengendalian kinerja seluruh lini yang menopang kinerja Kecamatan Pasirjambu.
2	❖ Masih kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan Pemerintahan	❖ Adanya sinergitas yang baik antara Pemerintah Kecamatan Pasirjambu dengan Perangkat Daerah terkait dalam hal pelayanan kepada masyarakat.
	❖ Kurang optimalnya kinerja Kecamatan dalam pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat.	❖ Inisiasi sosialisasi, penjelasan tentang pelayanan pemerintahan kepada masyarakat melalui media-media sosial yang mudah dijangkau oleh masyarakat serta melalui bimbingan teknis atau kegiatan lainnya.

No.	Faktor	
	Penghambat	Pendorong
		❖ Komitmen yang tinggi dari pimpinan untuk melaksanakan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat
3	❖ Masih kurangnya raihan pencapaian Desa Beradministrasi Baik.	❖ Komitmen yang tinggi antara Pemerintah Kecamatan dengan Kepala Desa dalam hal peningkatan kualitas sumber daya aparatur Desa. ❖ Komitmen yang tinggi antara Pemerintah Kecamatan sebagai fasilitator dengan Kepala Desa dalam hal pelaksanaan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan dan asetDesa.

Rencana Kinerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2026 telah memetakan analisis Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (SWOT) berdasarkan pendekatan kewilayahan pada masing-masing wilayah Kecamatan. Menurut Freddy (2013), analisis SWOT adalah analisa yang didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman. Gambar berikut ini menjabarkan kondisi Kecamatan Pasirjambu sesuai dengan analisis SWOT sebagai dasar untuk penentuan program yang akan dilaksanakan sebagai wujud pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Pasirjambu dalam menyelesaikan isu strategis Kabupaten Bandung.



Sumber Data : Kasi Pemerintahan / Sosbud Kecamatan Pasirjambu

Gambar 2.9 Analisis SWOT Kewilayahan Kecamatan Pasirjambu

Dari analisis SWOT tersebut menghasilkan rekomendasi kebijakan untuk menyelesaikan isu strategis yang diharapkan dapat menjadi basis perencanaan yang mendukung program mandatori kewilayahan pada tahun 2026 yaitu :

1. Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah untuk mendorong pengembangan wilayah seperti akses jalan, irigasi, infrastruktur pertanian, sanitasi, pengelolaan sampah.
2. Peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan layanan Pendidikan (terutama program penyetaraan Pendidikan) dan Pelatihan Ketenagakerjaan.
3. Peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan layanan kesehatan, layanan KB dan pengendalian penduduk.
4. Peningkatan jaringan kerjasama usaha pelaku ekonomi melalui kemitraan dan pemberdayaan UMKM dan Koperasi serta pelaku ekonomi lainnya.

Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, Kecamatan Pasirjambu sesuai tugas dan fungsinya merencanakan pelaksanaaan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik untuk mengatasi masalah sarana dan prasarana khususnya dalam hal peningkatan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang terkait dalam sarana dan prasarana pelayanan umum. Selain itu, Kecamatan Pasirjambu merencanakan pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan dari bupati kepada camat dalam hal fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat di bidang pendidikan dan fasilitasi

perencanaan, penetapan, dan peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan terutama program penyetaraan pendidikan.

Selain 2 program tersebut. Kecamatan Pasirjambu merencanakan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan khususnya dalam hal koordinasi kegiatan pemberdayaan desa. Koordinasi tersebut dilaksanakan dalam rangka peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan untuk pelaksanaan Forum Koordinasi Kecamatan Sehat (FKKS), fasilitasi kegiatan-kegiatan percepatan penurunan stunting.

Dalam rangka peningkatan jaringan kerjasama usaha pelaku ekonomi melalui kemitraan dan pemberdayaan UMKM dan Koperasi serta pelaku ekonomi lainnya, Kecamatan Pasirjambu merencanakan kegiatan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan fasilitasi pengembangan teknologi tepat guna untuk memfasilitasi program bupati terkait pengembangan ekonomi kewilayahan dan pembinaan teknologi tepat guna tingkat Kecamatan

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Terdapat penyesuaian tolok ukur kinerja serta anggaran sesuai analisis kebutuhan terhadap RKPD Tahun 2026. Review lengkap terhadap RKPD Tahun 2026 berkaitan dengan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2026. Rumusan kebutuhan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan dilengkapi dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target / tolok ukur, dan yang terpenting adalah besaran pagu anggaran yang dibutuhkan agar bisa disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan dilapangan.

Pada Tahun Anggaran 2026 Review Rancangan Awal RKPD terhadap hasil analisis kebutuhan dapat disampaikan melalui Tabel TC.31, sebagai berikut :

Tabel 2.8 - TC.31 Review Terhadap
Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN PASIRJAMBU

NO.	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026				URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN RKPD TAHUN 2026				CATATAN PENTING
			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN		PAGU INDIKATIF (RP)			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN		PAGU INDIKATIF (RP)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
KECAMATAN PASIRJAMBU						5.446.500.225						5.401.338.150	
	UNSUR KEWILAYAHAN					5.446.500.225						5.401.338.150	
	KECAMATAN					5.446.500.225						5.401.338.150	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kecamatan Pasirjambu	1. Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	61,00	Poin	4.807.491.184	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kecamatan Pasirjambu	1. Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	61,00	Poin	4.563.721.150	
			2. Indeks Manajemen Resiko Perangkat Daerah	35,20	Poin				2. Indeks Manajemen Resiko Perangkat Daerah	35,20	Poin		
1.1	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Pasirjambu	Nilai AKIP	81,00	Poin	35.199.000	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Pasirjambu	Nilai AKIP	81,00	Poin	36.500.000	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	5.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	3.000.000	
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3	Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3	Dokumen	5.000.000	
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4	Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4	Dokumen	5.000.000	
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	Dokumen	4.500.000	
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3	Dokumen	4.999.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3	Dokumen	4.500.000	
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	Laporan	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	Laporan	4.500.000	
1.1.7	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen	3.560.000	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen	5.000.000	

1.1.8	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	10	Data	1.640.000	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	10	Data	5.000.000	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Pasirjambu	Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang Tepat Waktu	100	Persen	4.268.338.284	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Pasirjambu	Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang Tepat Waktu	100	Persen	3.993.810.000	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	Orang/bulan	4.253.838.284	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	Orang/bulan	3.979.310.000	
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	Laporan	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	Laporan	5.000.000	
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	4	Laporan	4.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	4	Laporan	4.500.000	
1.2.4	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4	Dokumen	5.000.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4	Dokumen	5.000.000	
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kecamatan Pasirjambu	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD	100	Persen	5.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kecamatan Pasirjambu	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD	100	Persen	5.000.000	
1.3.1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	5.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	5.000.000	
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Pasirjambu	Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu	100	Persen	3.530.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Pasirjambu	Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu	100	Persen	5.000.000	
1.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		Paket		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		Paket		
1.4.2	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3	Dokumen	3.530.000	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3	Dokumen	5.000.000	
1.4.3	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Orang		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Orang		
1.4.4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Orang		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Orang		
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Pasirjambu	Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum	100	Persen	158.203.900	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Pasirjambu	Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum	100	Persen	120.240.750	

			Perangkat Daerah						Perangkat Daerah				
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Paket	12.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Paket	12.000.000	
1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	Paket	100.203.900	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	Paket	60.000.000	
1.5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10	Paket	5.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10	Paket	5.000.000	
1.5.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20	Paket	15.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20	Paket	15.000.000	
1.5.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	6.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	8.240.750	
1.5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10	Laporan	20.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10	Laporan	20.000.000	
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Pasirjambu	Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	100	Persen	10.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Pasirjambu	Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	100	Persen	50.000.000	
1.6.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		Unit	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		Unit		
1.6.2	Pengadaan Mebel	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3	Unit	10.000.000	Pengadaan Mebel	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3	Unit	50.000.000	
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Pasirjambu	Persentase Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	273.140.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Pasirjambu	Persentase Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	270.120.000	
1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Laporan	-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Laporan		
1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	18.220.000	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	16.000.000	
1.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	254.920.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	254.120.000	
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Pasirjambu	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	98,50	Persen	54.080.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Pasirjambu	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	98,50	Persen	83.050.400	
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7	Unit	15.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7	Unit	25.000.000	
1.8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	Unit	7.500.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	Unit	7.500.000	
1.8.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	31.580.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	50.550.400	
1.8.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi	Kecamatan	Jumlah Sarana dan		Unit	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi	Kecamatan	Jumlah Sarana dan		Unit		

	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pasirjambu	Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pasirjambu	Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Pasirjambu	Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Urusan Pemerintahan Umum dari Kepala Daerah kepada Camat	100	Persen	260.404.058	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Pasirjambu	Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Urusan Pemerintahan Umum dari Kepala Daerah kepada Camat	100	Persen	371.499.000	
2.1	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kecamatan Pasirjambu	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100	Persen	22.900.000	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kecamatan Pasirjambu	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100	Persen	25.000.000	
2.1.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1	Dokumen	22.900.000	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1	Dokumen	25.000.000	
2.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Pasirjambu	Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang Dilaksanakan	100	%	237.504.058	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Pasirjambu	Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang Dilaksanakan	100	%	346.499.000	
2.2.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1	Dokumen	4.664.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1	Dokumen	4.664.000	
2.2.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3	Laporan	232.840.058	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3	Laporan	341.835.000	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Pasirjambu	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang dibina	100	Persen	197.962.500	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Pasirjambu	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang dibina	100	Persen	217.118.000	
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Pasirjambu	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	Persen	144.117.200	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Pasirjambu	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	Persen	108.228.000	
3.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10	Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10	Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000	
3.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	Laporan	139.117.200	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	Laporan	103.228.000	
3.2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Pasirjambu	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Terfasilitasi	100	Persen	29.935.300	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Pasirjambu	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Terfasilitasi	100	Persen	58.890.000	
3.2.1	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10	Lembaga Kemasyarakatan	13.905.300	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10	Lembaga Kemasyarakatan	41.390.000	
3.2.2	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1	Laporan	10.170.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1	Laporan	15.000.000	
3.2.3	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1	Laporan	5.860.000	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1	Laporan	2.500.000	
3.3	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan	Kecamatan Pasirjambu	Persentase Fasilitasi dan Pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	100	Persen	23.910.000	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan	Kecamatan Pasirjambu	Persentase Fasilitasi dan Pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan	100	Persen	50.000.000	

	Kelurahan		Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				Kelurahan		Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				
3.3.1	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara		Keluarga	-	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara		Keluarga		
3.3.2	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan KelompokMasyarakat		Keluarga	-	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan KelompokMasyarakat		Keluarga		
3.3.3	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	10	Keluarga	-	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	10	Keluarga	25.000.000	
3.3.4	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri		Keluarga	-	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri		Keluarga		
3.3.5	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah		Keluarga	-	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah		Keluarga		
3.3.6	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yangBerkualitas dan Berdaya Saing		Keluarga	-	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yangBerkualitas dan Berdaya Saing		Keluarga		
3.3.7	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	10	Keluarga	4.350.000	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	10	Keluarga	15.000.000	
3.3.8	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	10	Keluarga	7.500.000	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	10	Keluarga	10.000.000	
3.3.9	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan		Keluarga	-	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan		Keluarga		

			Hidup						Hidup				
3.3.10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Keluarga yang Mengikuti PelatihanKeluarga Tanggap Bencana Alam		Keluarga	6.030.000	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Keluarga yang Mengikuti PelatihanKeluarga Tanggap Bencana Alam		Keluarga		
3.3.11	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Keluarga yang Mengikuti PelatihanKeluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga		Keluarga	6.030.000	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Keluarga yang Mengikuti PelatihanKeluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga		Keluarga		
3.3.12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan MenujuKeluarga Berkualitas		Keluarga	-	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan MenujuKeluarga Berkualitas		Keluarga		
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Pasirjambu	Persentase Koordinasi Penegakan Perda yang Berkaitan dengan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	Persen	41.075.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Pasirjambu	Persentase Koordinasi Penegakan Perda yang Berkaitan dengan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	Persen	50.000.000	
4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Pasirjambu	Persentase Koordinasi dan Pembinaan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	Persen	28.280.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Pasirjambu	Persentase Koordinasi dan Pembinaan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	Persen	35.000.000	
4.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1	Laporan	7.900.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1	Laporan	10.000.000	
4.1.2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1	Laporan	20.380.000	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1	Laporan	25.000.000	
4.2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Pasirjambu	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100	Persen	12.795.000	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Pasirjambu	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100	Persen	15.000.000	
4.2.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	3	Laporan	12.795.000	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	3	Laporan	15.000.000	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Pasirjambu	Persentase Koordinasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	Persen	97.962.483	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Pasirjambu	Persentase Koordinasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	Persen	124.000.000	
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Pasirjambu	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	Persen	97.962.483	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Pasirjambu	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	Persen	124.000.000	

5.1.1	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50	Orang	10.000.000	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50	Orang	10.000.000	
5.1.2	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100	Orang	40.000.000	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100	Orang	60.000.000	
5.1.3	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional	100	Orang	15.695.000	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional	100	Orang	14.000.000	
5.1.4	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1	Laporan	3.740.000	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1	Laporan	5.000.000	
5.1.5	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1	Dokumen	28.527.483	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1	Dokumen	35.000.000	
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Pasirjambu	Persentase Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Desa	100	Persen	41.605.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Pasirjambu	Persentase Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Desa	100	Persen	75.000.000	
6.1	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Pasirjambu	Persentase Desa yang Dibina dan Diawasi	100	Persen	41.605.000	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Pasirjambu	Persentase Desa yang Dibina dan Diawasi	100	Persen	75.000.000	
6.1.1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1	Dokumen	5.590.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1	Dokumen	5.000.000	
6.1.2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10	Dokumen	6.115.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10	Dokumen	25.000.000	Sesudah Digeser
6.1.3	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		Dokumen		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		Dokumen		Hasil Geser
6.1.4	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	10	Dokumen	29.900.000	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	10	Dokumen	45.000.000	

Pasirjambu, Juni 2025
Camat Pasirjambu

NIA KANIA, S.PT., M.I.L
NIP. 19780927 201001 2 008

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kecamatan Pasirjambu telah melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan pada Tahun 2024 untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2026. Dan berdasarkan hasil pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tersebut tidak terdapat Usulan Program dan Kegiatan dari masyarakat maka untuk Tabe 2.8-TC.32 Nihil.

Tabel 2.9 TC.32 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Bandung

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN PASIRJAMBU

NOMOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN RKPD TAHUN 2026				CATATAN PENTING
			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN		TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	HASIL MAPPING INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN NOMENKLATUR 050 TAHUN 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8
			N I H I L				

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 terdapat beberapa isu strategis, salah satunya adalah meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan, kesehatan, dan keterampilan kerja agar produktif dan berdaya saing, digitalisasi birokrasi, pelayanan publik adaptif, reformasi kelembagaan, dan peningkatan integritas ASN. Oleh karena itu, pemerintah pusat mencanangkan agenda Pembangunan Nasional Tahun 2026, yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2026-2029, berfokus pada 6 sasaran utama, yaitu : 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, 2. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, 3. Mengurangi Ketimpangan Wilayah, 4. Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, 5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Inklusif, 6. Menjaga Stabilitas Sosial, Politik, dan Keamanan Nasional, untuk menyelesaikan isu strategis tersebut Kabupaten Bandung dalam mendukung agenda Pembangunan Nasional telah mencanangkan misi 3 yaitu “Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel”. Konsep tata kelola pemerintahan dengan prinsip good governance sudah sering digalakkan baik dalam skala pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam satu dekade terakhir. Dalam melengkapi konsep good governance yang masIh terus diupayakan, penerapan konsep dynamic governance dirasa penting untuk diadakan. Konsep tata kelola pemerintahan yang dinamis adalah mencoba menciptakan pemerintahan yang selalu adaptif terhadap dinamika perubahan dan tantangan yang selalu berubah setiap waktunya.

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan dinamis maka perlu adanya dorongan beberapa faktor yaitu meningkatnya kualitas e- government melalui peningkatan kualitas kinerja aparatur, tata kelola pemerintahan, dan penyelenggaraan pelayanan publik, dan peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, pemerintah daerah perlu menciptakan stabilitas lingkungan bermasyarakat yang religius dan kondusif dengan cara meningkatkan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Untuk mencegah kesimpangsiuran pemahaman, maka Dokumen Perencanaan ini disusun mulai dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW),

RPJPD, RPJMD, Renstra, dan RKPD yang diaktualisasikan melalui Penyusunan Renja (RENJA) SKPD, selanjutnya diimpelemtasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut di atas maka Dokumen Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Pasirjambu Tahun 2026 dalam proses Penyusunan Dokumen Renja harus memperhatikan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.

Dalam sistem penganggaran selama ini, keterlibatan Kecamatan Pasirjambu adalah pada awal proses dalam bentuk penetapan pagu indikatif sehingga perannya dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan relatif terbatas. Ke depan, diharapkan seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung termasuk Kecamatan Pasirjambu dapat dilibatkan penuh dalam sistem pengganggaran untuk menjamin konsistensi antara perencanaan dan pengganggaran serta pelaksanaannya.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan Misi 3 sebagaimana tertuang dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029, yaitu “Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel” maka perlu dijabarkan kembali ke dalam tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional yang dituangkan dalam Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung Tahun 2026, agar pelaksanaannya lebih terukur dan terarah.

Untuk lebih jelasnya kami sajikan tabel tujuan dan sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Renstra Kecamatan Pasirjambu Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Tahun 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Laju IKM	0,22
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan	Nilai IKM	92,08

3.2.1 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta isu-isu strategis, maka visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Bandung Tahun 2026-2029 adalah:

Berdasarkan kajian - kajian yang terdapat pada RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2026-2029 terdapat tantangan - tantangan dalam pembangunan yang masih dihadapi, maka dalam kurun waktu periode Tahun 2026-2029 ditetapkan Visi Pembangunan Kabupaten Bandung yaitu "Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera (BEDAS), Maju dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas".

Berikut penjabaran makna yang terkandung dalam Visi Kabupaten Bandung Tahun 2026-2029 adalah sebagai berikut :

1. Lebih Bedas: Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bedas memiliki arti yaitu untuk menginternalisasi nilai-nilai luhur yang diwariskan leluhur dan senantiasa dilestarikan sebagai dasar-dasar kehidupan bermasyarakat warga Kabupaten Bandung dalam membangun peradaban yang terus lebih baik dari masa ke masa.
2. Maju: Terwujudnya Kabupaten Bandung Maju memiliki arti yaitu Kabupaten Bandung dalam 5 (lima) tahun kepemimpinan akan mencapai kondisi terbaik perkembangan masyarakat yang ditunjukkan oleh tingginya angka indikator-indikator tertentu yang berlaku, tercapainya standar minimal yang ditetapkan secara nasional, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) hingga melampaui rata-rata provinsi dan nasional.
3. Berkelanjutan: Terwujudnya Kabupaten Bandung Berkelanjutan memiliki arti yaitu pembangunan yang optimal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung akan diupayakan dengan mempertimbangkan segala aspek secara bijaksana. Pembangunan yang diselenggarakan tidak akan pernah mengorbankan alam sehingga manfaatnya dapat terus dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Bandung.

Berdasarkan visi pembangunan yang ada, dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka dirumuskan misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bandung Tahun 2026- 2029 dengan mengacu rumusan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang diselaraskan dengan misi RPJPD. Misi pembangunan berikut akan

menjadi acuan dalam pembuatan program serta kegiatan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Berikut misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2026-2029 :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul, Kompetitif dan Berakhlak serta Penguatan Keseteraan Gender Melalui Pemberdayaan Perempuan dan Mendorong Perlindungan Bagi Anak
2. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Mendorong Ketahanan Pangan Melalui Produksi Pangan Lokal yang Berkelanjutan
3. Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel
4. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi
5. Menjaga Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum

Berdasarkan hasil penelahaan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut, Kecamatan Pasirjambu akan menyelesaikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai Misi ke 3, yaitu : “Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel”.

3.2.2 Penentuan Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan terhadap perangkat daerah dimasa yang datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya.

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu diatasi secara bertahap. Berdasarkan identifikasi permasalahan-permasalahan dan hasil telaahan lainnya, maka isu strategis yang berkaitan langsung dengan pelayanan di Kecamatan Pasirjambu, yaitu :

1. Pelayanan publik masih belum optimal;
2. Masih Tingginya prevelensi stunting;
3. Belum Efektifnya Pengelolaan sampah;

4. Masih Adanya Masyarakat yang miskin ekstrem;
5. Masih Tingginya kerentanan dan potensi bencana alam;
6. Masih Rendahnya kualitas SDM perangkat Desa yang berimplikasikan terhadap kinerja Pemerintahan Desa yang belum optimal;
7. Masih terdapat sejumlah pelimpahan kewenangan yang belum dapat dilaksanakan yang disebabkan karena belum adanya juklak dan juknis dari instansi terkait Pelayanan Masyarakat belum optimal. .
8. Adanya pembangunan tempat usaha dilahan pertanian yang akan berdampak pada tata ruang wilayah.

3.2.3 Penentuan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Berdasarkan telahaan visi dan misi Kepala Daerah terpilih, agar visi dan misi tersebut dapat diwujudkan serta sebagai upaya penyelesaian isu strategis yang telah dirumuskan, maka Kecamatan Pasirjambu menetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah berdasarkan pada sasaran yang ingin dicapai dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2026-2029 yang berpedoman kepada visi dan misi bupati. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan. Sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Pasirjambu Tahun 2026-2029 merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan.

Uraian tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Kecamatan Pasirjambu pada periode tahun 2026-2029 terperinci dalam gambar dan tabel berikut ini :





Gambar 3.1 Cascading RPJMD terhadap Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa Kecamatan Pasirjambu memiliki 1 (satu) tujuan jangka menengah yaitu : "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik".

Tujuan ini ditekankan pada Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik. Untuk mencapai tujuan ini Kecamatan Pasirjambu menentukan 1 (satu) sasaran yaitu "Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan" Indikator Kinerja untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran tersebut yaitu dengan mengukur Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan melalui pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Pengukuran tersebut dilaksanakan melalui metode survey yaitu Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan secara

komperhensif dengan tujuan mengukur tingkat kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.

Peningkatan kualitas pelayanan publik tidak serta merta hanya diukur dari sisi kepuasan masyarakat saja, namun harus diukur dari kualitas pemerintahan desa yang langsung berhadapan melayani masyarakat. Persentase Desa Beradministrasi Baik merupakan indikator untuk mengukur sejauh mana kualitas pemerintahan desa telah dicapai. Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi desa yang mampu berfungsi sebagai sumber data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat maka Persentase Desa Beradministrasi Baik dipandang perlu untuk dijadikanindikator keberhasilan dalam mensukseskan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

Tujuan dan Sasaran tersebut perlu ditindaklanjuti dengan penentuan strategi disertai arah kebijakan yang relevan untuk pencapaiannya. Tabel berikut ini merupakan matriks arah kebijakan terhadap tujuan dan sasaran Kecamatan Pasirjambu.

Tabel 3.2 Matriks Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Pasirjambu Tahun 2026

Visi :	“Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera (BEDAS), Maju dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas”		
Misi 3 :	Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Kebutuhan Masyarakat	- Standarisasi Prosedur Pelayanan di setiap Kecamatan - Pengembangan Sistem Pelayanan Digital / Online - Penguatan Kapasitas dan Kompetensi Aparatur Kecamatan
		2. Peningkatan Keterjangkauan dan Aksesibilitas Pelayanan	- Penambahan Sarana Prasarana Pelayanan Masyarakat Di - Kecamatan Peningkatan Layanan Mobile - dan Jemput Bola untuk Daerah Terpencil Penyesuaian Jam Layanan yang Lebih Fleksibel

		3. Peningkatan Partisipasi dan Pengawasan Masyarakat	- Optimalisasi Pengaduan Masyarakat melalui Sistem - Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau - Kanal Lokal Pelibatan Tokoh Masyarakat Dalam Forum Konsultasi Publik Kecamatan Survei Kepuasan Masyarakat Secara Berkala sebagai Dasar Evaluasi
		4. Penguatan Tata Kelola dan Integritas Pelayanan	- Implementasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi / Wilayah Birokrasi - Bersih dan Melayani Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Berbasis - Indikator Kepuasan Pengawasan Internal Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pelayanan

3.2.4 Indikator Kinerja Turunan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Untuk memperjelas Kerangka Kerja dari Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah maka diperlukan penentuan Indikator Kinerja dari Turunan Tujuan dan Sasaran yang hendak dicapai.

Berikut ini kami sajikan Tabel 3.3 yang merupakan Matriks Indikator Kinerja dari Tujuan dan Sasaran beserta turunanny

Tabel 3.3 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Kecamatan Pasirjambu

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR						KET.
				ULTIMATE OUTCOME	*INTERMEDIATE OUTCOME*	*IMMEDIATE OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROSES	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik							Laju IKM	Laju IKM= IKM(t)-IKM(t-1)/IKM (t-1)x100%	
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan						Nilai IKM		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Kecamatan dalam Mengelola Urusan Pemerintahan Umum sebagai Perpanjangan Tangan Kepala Daerah				Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Urusan Pemerintahan Umum dari Kepala Daerah kepada Camat	Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan : Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan x 100%	Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan : Jumlah urusan pemerintahan yang ditargetkan x 100%
			Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Terlaksananya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum yang terlaksana/ Jumlah koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum yang direncanakan x 100%	

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR						KET.
				ULTIMATE OUTCOME	*INTERMEDIATE OUTCOME*	*IMMEDIATE OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROSES	
			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		
			Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta				Terlaksananya Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum dengan Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta		
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan	Jumlah Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan	Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan	Jumlah Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana / Jumlah Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang direncanakan x 100%	Kepbup 137 Tahun 2023
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan		
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan		
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		
			PROGRAM	Meningkatnya				Persentase Lembaga	Jumlah Lembaga	DO: Permen 81

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR						KET.
				ULTIMATE OUTCOME	*INTERMEDIATE OUTCOME*	*IMMEDIATE OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROSES	
			PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kapasitas dan Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat				Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang dibina	Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang dibina : Dibagi Jumlah Keseluruhan Lembaga Kemasyrakatan Desa dan Kelurahan x 100%	Tahun 2015
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang terlaksana/ Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang direncanakan x 100%	
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		
			Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan		

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR						KET.
				ULTIMATE OUTCOME	*INTERMEDIATE OUTCOME*	*IMMEDIATE OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROSES	
							Wilayah Kecamatan	Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana/ Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang direncanakan x 100%	
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
			Evaluasi Kelurahan				Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan		
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Terfasilitasi	jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Terfasilitasi	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Terfasilitasi	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Terfasilitasi/ Jumlah fasilitasi Lembaga kemasyarakatan yang direncanakan x 100%	
			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		
			Peningkatan Kapasitas Lembaga				Meningkatnya Kapasitas Lembaga	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang		

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR						KET.
				ULTIMATE OUTCOME	*INTERMEDIATE OUTCOME*	*IMMEDIATE OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROSES	
			Kemasyarakatan				Kemasyarakatan	Ditingkatkan Kapasitasnya		
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan				Tersedianya Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan		
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
			Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				Terlaksananya Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		
			Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Persentase fasilitasi dan pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah fasilitasi dan pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase fasilitasi dan pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah fasilitasi dan pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang dilaksanakan/ Jumlah fasilitasi dan pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang direncanakan x 100%	
			Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan				Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek		

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR						KET.
				ULTIMATE OUTCOME	*INTERMEDIATE OUTCOME*	*IMMEDIATE OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROSES	
			Bernegara				Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara		
			Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan KelompokMasyarakat		
			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri		
			Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah		
			Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yangBerkualitas dan Berdaya Saing		

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR						KET.
				ULTIMATE OUTCOME	*INTERMEDIATE OUTCOME*	*IMMEDIATE OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROSES	
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya		
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup		
			Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti PelatihanKeluarga Tanggap Bencana Alam		
			Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga				Terlaksananya Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti PelatihanKeluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga		
			Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan		

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR						KET.
				ULTIMATE OUTCOME	*INTERMEDIATE OUTCOME*	*IMMEDIATE OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROSES	
							Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Perencanaan Kehidupan MenujuKeluarga Berkualitas		
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Efektivitas Koordinasi dalam Penegakan Peraturan Daerah guna Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Tenteram dan Tertib				Persentase Koordinasi Penegakan Perda yang Berkaitan dengan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi penegakkan perda yang berkaitan dengan Trantibum di Kecamatan : Jumlah koordinasi penegakkan perda yang direncanakan berkaitan dengan Trantibum di Kecamatan x 100%	
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persentase Koordinasi dan Pembinaan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi dan Pembinaan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi dan Pembinaan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koodinasi dan Pembinaan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana/ Jumlah Koodinasi dan Pembinaan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang direncanakan x 100%	
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah				Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi		

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR						KET.
				ULTIMATE OUTCOME	*INTERMEDIATE OUTCOME*	*IMMEDIATE OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROSES	
			Kecamatan				Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Vertikal di Wilayah Kecamatan		
			Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		
			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			Jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang dilaksanakan/ Jumlah koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang direncanakan x 100%	
			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN	Meningkatnya Efektivitas Koordinasi Kecamatan dalam				Persentase Koordinasi Pelaksanaan Penyelenggaraan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan	

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR						KET.
				ULTIMATE OUTCOME	*INTERMEDIATE OUTCOME*	*IMMEDIATE OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROSES	
			PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Wilayah Kerja Kecamatan				Urusan Pemerintahan Umum	umum yang dilaksanakan : Jumlah koordinasi urusan pemerintahan umum yang direncanakan x 100%	
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah/ Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang direncanakan x 100%	
			Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		
			Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		
			Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional				Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional		

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR						KET.
				ULTIMATE OUTCOME	*INTERMEDIATE OUTCOME*	*IMMEDIATE OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROSES	
							Nasional			
			Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa melalui Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi yang Berkesinambungan di Wilayah Kecamatan				Persentase Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Desa	Jumlah Pelaksanaan pembinaan dan monev pada pemerintahan desa : Jumlah perencanaan pembinaan dan monev pada pemerintahan desa	DO: Permen 81 Tahun 2015
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase Desa yang Dibina dan Diawasi	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen yang memenuhi standar yang berlaku	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Dibina dan Diawasi	Jumlah desa yang dibina dan diawasi/Total jumlah desa x100%	
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset		

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR						KET.
				ULTIMATE OUTCOME	*INTERMEDIATE OUTCOME*	*IMMEDIATE OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROSES	
								Desa		
			Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah				1. Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah 2. Indeks Manajemen Resiko Perangkat Daerah		
			Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja		Nilai AKIP	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen yang memenuhi standar yang berlaku	Terlaksananya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
			Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan		

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR						KET.
				ULTIMATE OUTCOME	*INTERMEDIATE OUTCOME*	*IMMEDIATE OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROSES	
							dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
			Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		
			Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang Tepat Waktu	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai SAP	Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang Tepat Waktu		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan		

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR						KET.
				ULTIMATE OUTCOME	*INTERMEDIATE OUTCOME*	*IMMEDIATE OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROSES	
								Tunjangan ASN		
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD		
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD		
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR						KET.
				ULTIMATE OUTCOME	*INTERMEDIATE OUTCOME*	*IMMEDIATE OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROSES	
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD		Terlaksananya Administrasi BMD	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD		
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		
			Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			Jumlah Dokumen, Rencana Kebutuhan dan Laporan Administrasi Barang yang memenuhi Ketentuan yang Berlaku	Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		
			Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah SKPD				Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
			Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		
			Administrasi Kepegawaian		Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu	Jumlah Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu	Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu		
			Peningkatan Sarana dan				Tersedianya Unit	Jumlah Unit		

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR						KET.
				ULTIMATE OUTCOME	*INTERMEDIATE OUTCOME*	*IMMEDIATE OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROSES	
			Prasarana Disiplin Pegawai				Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
			Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaaan Sistem Informasi Kepegawaian		
			Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai				Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
			Pemulanagan Pegawai yang Pensiun				Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan		
			Pemulanagan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas				Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas		
			Pemindahan Tugas ASN				Terlaksananya Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan		
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR						KET.
				ULTIMATE OUTCOME	*INTERMEDIATE OUTCOME*	*IMMEDIATE OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROSES	
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		
			Admnisitrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
			Peneydiaan Peralatan Rumah Tangga				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
			Penyediaan Bahan/Material				Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR						KET.
				ULTIMATE OUTCOME	*INTERMEDIATE OUTCOME*	*IMMEDIATE OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROSES	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan rbasis Elektronik pada SKPD				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah		
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Tersedianyan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		
			Pengadaan Alat Besar				Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan		
			Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor				Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan		
			Pengadaan Mebel				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR						KET.
				ULTIMATE OUTCOME	*INTERMEDIATE OUTCOME*	*IMMEDIATE OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROSES	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
			Pengadaan Aset Tetap Laiannya				Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan		
			Pengadaan Aset Tak Terwujud				Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan		
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PenunjangUrusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR						KET.
				ULTIMATE OUTCOME	*INTERMEDIATE OUTCOME*	*IMMEDIATE OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROSES	
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD dalam Kondisi Baik		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Dalam Kondisi Baik		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah BMD Dalam Kondisi Baik	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya		
			Pemeliharaan Mebel				Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR						KET.
				ULTIMATE OUTCOME	*INTERMEDIATE OUTCOME*	*IMMEDIATE OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROSES	
			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara		
			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara		
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi		
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah				Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi		

Pasirjambu, Juni 2025
Camat Pasirjambu

NIA KANIA, S.PT., M.I.L
NIP. 19780927 201001 2 008

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang mengacu pada VISI dan MISI Kepala Daerah, Kecamatan Pasirjambu telah menyusun Program dan Kegiatan, yang terdiri dari 6 (enam) program, 17 (tujuh belas) kegiatan dan 74 (tujuh puluh empat) Sub Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.5.401.338.150,00 terhitung (Lima Milyar Empat Ratus Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah).

Untuk lebih jelasnya Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.4 - TC.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan

Kecamatan Pasirjambu Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kabupaten Bandung

Nama PD : Kecamatan Pasirjambu

KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027	
Urusan/Unsur	Bidang Urusan/Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9	(10)
KECAMATAN PASIRJAMBU									5.401.338.150				5.218.144.400
7					UNSUR KEWILAYAHAN				5.401.338.150				5.218.144.400
7	01				KECAMATAN				5.401.338.150				5.218.144.400
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kecamatan Pasirjambu	61,00 Poin	4.563.721.150	PAD/DAU		61,00 Poin	4.561.480.400
						2. Indeks Manajemen Resiko Perangkat Daerah		35,20 Poin				35,20 Poin	
7	01	01	2.01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Kecamatan Pasirjambu	81,00 Poin	36.500.000	DAU		81,00 Poin	36.500.000
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Pasirjambu	2 Dokumen	3.000.000	DAU		2 Dokumen	3.000.000
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Pasirjambu	3 Dokumen	5.000.000	DAU		3 Dokumen	5.000.000
7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Pasirjambu	4 Dokumen	5.000.000	DAU		4 Dokumen	5.000.000
7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil	Kecamatan	2 Dokumen	4.500.000	DAU		2 Dokumen	4.500.000

					Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Pasirjambu							
7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Pasirjambu	3	Dokumen	4.500.000	DAU		3	Dokumen	4.500.000
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Pasirjambu	3	Laporan	4.500.000	DAU		3	Laporan	4.500.000
7	01	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kecamatan Pasirjambu	1	Dokumen	5.000.000	DAU		1	Dokumen	5.000.000
7	01	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Kecamatan Pasirjambu	10	Data	5.000.000	DAU		10	Data	5.000.000
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang Tepat Waktu	Kecamatan Pasirjambu	100	Persen	3.993.810.000	PAD/DAU		100	Persen	3.993.810.000
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Pasirjambu	12	Orang/bulan	3.979.310.000	PAD		12	Orang/bulan	3.979.310.000
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Pasirjambu	2	Laporan	5.000.000	DAU		2	Laporan	5.000.000
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan /	Kecamatan Pasirjambu	4	Laporan	4.500.000	DAU		4	Laporan	4.500.000

						Semesteran SKPD								
7	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Pasirjambu	4	Dokumen	5.000.000	DAU		4	Dokumen	5.000.000
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD	Kecamatan Pasirjambu	100	Persen	5.000.000	DAU		100	Persen	5.000.000
7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Pasirjambu	1	Laporan	5.000.000	DAU		1	Laporan	5.000.000
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu	Kecamatan Pasirjambu	100	Persen	5.000.000	DAU		100	Persen	5.000.000
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kecamatan Pasirjambu		Paket		DAU			Paket	
7	01	01	2.05	0005	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kecamatan Pasirjambu	3	Dokumen	5.000.000	DAU		3	Dokumen	5.000.000
7	01	1	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Pasirjambu		Orang		DAU			Orang	
7	01	1	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Pasirjambu		Orang		DAU			Orang	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Pasirjambu	100	Persen	120.240.750	DAU		100	Persen	118.000.000
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Pasirjambu	12	Paket	12.000.000	DAU		12	Paket	12.000.000
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Pasirjambu	6	Paket	60.000.000	DAU		6	Paket	60.000.000

7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kecamatan Pasirjambu	10	Paket	5.000.000	DAU		10	Paket	5.000.000
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kecamatan Pasirjambu	20	Paket	15.000.000	DAU		20	Paket	15.000.000
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Pasirjambu	12	Paket	8.240.750	DAU		12	Paket	6.000.000
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Pasirjambu	10	Laporan	20.000.000	DAU		10	Laporan	20.000.000
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	Kecamatan Pasirjambu	100	Persen	50.000.000	DAU		100	Persen	50.000.000
7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kecamatan Pasirjambu		Unit		DAU			Unit	
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kecamatan Pasirjambu	3	Unit	50.000.000	DAU		3	Unit	50.000.000
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Pasirjambu	100	Persen	270.120.000	DAU		100	Persen	270.120.000
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Pasirjambu		Laporan		DAU			Laporan	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Pasirjambu	12	Laporan	16.000.000	DAU		12	Laporan	16.000.000
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Pasirjambu	12	Laporan	254.120.000	DAU		12	Laporan	254.120.000
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	Kecamatan Pasirjambu	98,50	Persen	83.050.400	DAU		98,50	Persen	83.050.400

7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kecamatan Pasirjambu	7	Unit	25.000.000	DAU		7	Unit	25.000.000
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan Pasirjambu	5	Unit	7.500.000	DAU		5	Unit	7.500.000
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Pasirjambu	2	Unit	50.550.400	DAU		2	Unit	50.550.400
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Pasirjambu		Unit		DAU			Unit	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Urusan Pemerintahan Umum dari Kepala Daerah kepada Camat	Kecamatan Pasirjambu	100	Persen	371.499.000	DAU		100	Persen	371.499.000
7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kecamatan Pasirjambu	100	Persen	25.000.000	DAU		100	Persen	25.000.000
7	01	02	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kecamatan Pasirjambu	1	Dokumen	25.000.000	DAU		1	Dokumen	25.000.000
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang Dilaksanakan	Kecamatan Pasirjambu	100	%	346.499.000	DAU		100	%	249.664.000
7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Kecamatan Pasirjambu	1	Dokumen	4.664.000	DAU		1	Dokumen	4.664.000
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan	Jumlah Laporan	Kecamatan	3	Laporan	341.835.000	DAU		3	Laporan	245.000.000

					Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pasirjambu								
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang dibina	Kecamatan Pasirjambu	100	Persen	217.118.000	DAU		100	Persen	133.000.000
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Pasirjambu	100	Persen	108.228.000	DAU		100	Persen	43.500.000
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Pasirjambu	10	Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000	DAU		10	Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Pasirjambu	1	Laporan	103.228.000	DAU		1	Laporan	38.500.000
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Terfasilitasi	Kecamatan Pasirjambu	100	Persen	58.890.000	DAU		100	Persen	39.500.000
7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kecamatan Pasirjambu	10	Lembaga Kemasyarakatan	41.390.000	DAU		10	Lembaga Kemasyarakatan	22.000.000
7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Pasirjambu	1	Laporan	15.000.000	DAU		1	Laporan	15.000.000
7	01	03	2.03	0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kecamatan Pasirjambu	1	Laporan	2.500.000	DAU		1	Laporan	2.500.000
7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Fasilitasi dan Pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan Pasirjambu	100	Persen	50.000.000	DAU		100	Persen	50.000.000
7	01	03	2.06	0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga	Kecamatan Pasirjambu		Keluarga		DAU			Keluarga	

					Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara									
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan KelompokMasyarakat	Kecamatan Pasirjambu		Keluarga		DAU			Keluarga	
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kecamatan Pasirjambu	10	Keluarga	25.000.000	DAU		10	Keluarga	25.000.000
7	01	03	2.06	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Kecamatan Pasirjambu		Keluarga		DAU			Keluarga	
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kecamatan Pasirjambu		Keluarga		DAU			Keluarga	
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yangBerkualitas dan Berdaya Saing	Kecamatan Pasirjambu		Keluarga		DAU			Keluarga	

7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kecamatan Pasirjambu	10	Keluarga	15.000.000	DAU		10	Keluarga	15.000.000
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kecamatan Pasirjambu	10	Keluarga	10.000.000	DAU		10	Keluarga	10.000.000
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kecamatan Pasirjambu		Keluarga		DAU			Keluarga	
7	01	03	2.06	0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti PelatihanKeluarga Tanggap Bencana Alam	Kecamatan Pasirjambu		Keluarga		DAU			Keluarga	
7	01	03	2.06	0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti PelatihanKeluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Kecamatan Pasirjambu		Keluarga		DAU			Keluarga	
7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan MenujuKeluarga Berkualitas	Kecamatan Pasirjambu		Keluarga		DAU			Keluarga	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Penegakan Perda yang Berkaitan dengan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Pasirjambu	100	Persen	50.000.000	DAU		100	Persen	50.000.000

7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi dan Pembinaan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Pasirjambu	100	Persen	35.000.000	DAU		100	Persen	35.000.000
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Pasirjambu	1	Laporan	10.000.000	DAU		1	Laporan	10.000.000
7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Pasirjambu	1	Laporan	25.000.000	DAU		1	Laporan	25.000.000
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Pasirjambu	100	Persen	15.000.000	DAU		100	Persen	15.000.000
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Pasirjambu	3	Laporan	15.000.000	DAU		3	Laporan	15.000.000
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Pasirjambu	100	Persen	124.000.000	DAU		100	Persen	124.000.000
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Pasirjambu	100	Persen	124.000.000	DAU		100	Persen	124.000.000
7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi)	Kecamatan Pasirjambu	50	Orang	10.000.000	DAU		50	Orang	10.000.000

						Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional								
7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kecamatan Pasirjambu	100	Orang	60.000.000	DAU		100	Orang	60.000.000
7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional	Kecamatan Pasirjambu	100	Orang	14.000.000	DAU		100	Orang	14.000.000
7	01	05	2.01	0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Pasirjambu	1	Laporan	5.000.000	DAU		1	Laporan	5.000.000
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Pasirjambu	1	Dokumen	35.000.000	DAU		1	Dokumen	35.000.000
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Desa	Kecamatan Pasirjambu	100	Persen	75.000.000	DAU		100	Persen	75.000.000
7	01	06	2.01		Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Dibina dan Diawasi	Kecamatan Pasirjambu	100	Persen	75.000.000	DAU		100	Persen	75.000.000
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Pasirjambu	1	Dokumen	5.000.000	DAU		1	Dokumen	5.000.000
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Pasirjambu	10	Dokumen	25.000.000	DAU		10	Dokumen	25.000.000
7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Pasirjambu		Dokumen		DAU		8	Dokumen	40.000.000
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi	Jumlah Dokumen	Kecamatan	10	Dokumen	45.000.000	DAU		10	Dokumen	45.000.000

					Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Pasirjambu						

Mengetahui,
a.n Kepala Bappelitbangda
Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia Dan Pemerintahan

LILIS ROSTINI, S.H., M.H.
NIP. 19781211 200501 2 009

Verifikator,
Fungsional Perencana Ahli Muda

AGUNG RAHADIAN, S.IP., M.Si.
NIP. 19761213 201001 1 002

Pasirjambu, Juni 2025
CAMAT PASIRJAMBU,

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG KEC. PASIRJAMBU

NIA KANIA, S.PT., M.I.L
NIP. 19780927 201001 2 008

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1 Rencana Kerja Pencapaian Sasaran

Berdasarkan analisa kebutuhan, Kecamatan Pasirjambu menetapkan program, kegiatan dan subkegiatan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan, sasaran dalam usaha penyelesaian isu strategis. Sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Pasirjambu maka program dan kegiatan direncanakan untuk mendukung urusan kewilayahan yang keberhasilannya diukur dari Indikator Kinerja Utama.



Gambar 4.1 Target Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pasirjambu

Untuk mencapai tujuan, sasaran tersebut dibutuhkan rumusan program dan kegiatan yang dapat mendukung pencapaian sasaran. Sebelum menentukan besaran pagu anggaran yang dibutuhkan perlu ditentukan program apa yang dapat menyelesaikan isu yang berkaitan langsung dengan pelayanan Kecamatan Pasirjambu dengan ukuran keberhasilan Indikator Kinerja Utama yang telah ditentukan.

Berikut ini adalah penentuan rencana program yang akan dilaksanakan :

4.2 Rencana Pendanaan Perangkat Daerah

Setelah menentukan program yang akan dilaksanakan untuk menyelesaikan isu strategis, maka dirumuskan perencanaan pendanaan untuk melaksanakan program-program yang dipilih. Total program, kegiatan, subkegiatan beserta besaran anggaran yang diusulkan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Pasirjambu Tahun 2026

NO.	SASARAN	KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING
		Urusan/Unsur	Bidang Urusan/Bidang Unsur	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
KECAMATAN PASIRJAMBU											5.401.338.150		
		7					UNSUR KEWILAYAHAN				5.401.338.150		
		7	01				KECAMATAN				5.401.338.150		
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kecamatan Pasirjambu	61,00 Poin	4.563.721.150	PAD/DAU	
								2. Indeks Manajemen Resiko Perangkat Daerah		35,20 Poin			
1.1		7	01	01	2.01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Kecamatan Pasirjambu	81,00 Poin	36.500.000	DAU	
1.1.1		7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Pasirjambu	2 Dokumen	3.000.000	DAU	
1.1.2		7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Pasirjambu	3 Dokumen	5.000.000	DAU	
1.1.3		7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Pasirjambu	4 Dokumen	5.000.000	DAU	
1.1.4		7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kecamatan Pasirjambu	2 Dokumen	4.500.000	DAU	
1.1.5		7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Pasirjambu	3 Dokumen	4.500.000	DAU	
1.1.6		7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Pasirjambu	3 Laporan	4.500.000	DAU	
1.1.7		7	01	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung	Kecamatan Pasirjambu	1 Dokumen	5.000.000	DAU	

NO.	SASARAN	KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING
		Urusan/Unsur	Bidang Urusan/Bidang Unsur	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
								Statistik Sektoral Daerah					
1.1.8		7	01	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Kecamatan Pasirjambu	10 Data	5.000.000	DAU	
1.2		7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang Tepat Waktu	Kecamatan Pasirjambu	100 Persen	3.993.810.000	PAD/DAU	
1.2.1		7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Pasirjambu	12 Orang/bulan	3.979.310.000	PAD	
1.2.2		7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Pasirjambu	2 Laporan	5.000.000	DAU	
1.2.3		7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Kecamatan Pasirjambu	4 Laporan	4.500.000	DAU	
1.2.4		7	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Pasirjambu	4 Dokumen	5.000.000	DAU	
1.3		7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD	Kecamatan Pasirjambu	100 Persen	5.000.000	DAU	
1.3.1		7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Pasirjambu	1 Laporan	5.000.000	DAU	
1.4		7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu	Kecamatan Pasirjambu	100 Persen	5.000.000	DAU	
1.4.1		7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kecamatan Pasirjambu	Paket		DAU	
1.4.2		7	01	01	2.05	0005	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kecamatan Pasirjambu	3 Dokumen	5.000.000	DAU	
1.4.3		7	01	1	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Pasirjambu	Orang		DAU	
1.4.4		7	01	1	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Pasirjambu	Orang		DAU	
1.5		7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Pasirjambu	100 Persen	120.240.750	DAU	
1.5.1		7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Pasirjambu	12 Paket	12.000.000	DAU	

NO.	SASARAN	KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING
		Urusan/Unsur	Bidang Urusan/Bidang Unsur	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.5.2		7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Pasirjambu	6 Paket	60.000.000	DAU	
1.5.3		7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kecamatan Pasirjambu	10 Paket	5.000.000	DAU	
1.5.4		7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kecamatan Pasirjambu	20 Paket	15.000.000	DAU	
1.5.5		7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Pasirjambu	12 Paket	8.240.750	DAU	
1.5.6		7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Pasirjambu	10 Laporan	20.000.000	DAU	
1.6		7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	Kecamatan Pasirjambu	100 Persen	50.000.000	DAU	
1.6.1		7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kecamatan Pasirjambu	Unit		DAU	
1.6.2		7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kecamatan Pasirjambu	3 Unit	50.000.000	DAU	
1.7		7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Pasirjambu	100 Persen	270.120.000	DAU	
1.7.1		7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Pasirjambu	Laporan		DAU	
1.7.2		7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Pasirjambu	12 Laporan	16.000.000	DAU	
1.7.3		7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Pasirjambu	12 Laporan	254.120.000	DAU	
1.8		7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	Kecamatan Pasirjambu	98,50 Persen	83.050.400	DAU	
1.8.1		7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kecamatan Pasirjambu	7 Unit	25.000.000	DAU	
1.8.2		7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan Pasirjambu	5 Unit	7.500.000	DAU	
1.8.3		7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Pasirjambu	2 Unit	50.550.400	DAU	
1.8.4		7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Pasirjambu	Unit		DAU	

NO.	SASARAN	KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING
		Urusan/Unsur	Bidang Urusan/Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2		7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Urusan Pemerintahan Umum dari Kepala Daerah kepada Camat	Kecamatan Pasirjambu	100 Persen	371.499.000	DAU	
2.1		7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kecamatan Pasirjambu	100 Persen	25.000.000	DAU	
2.1.1		7	01	02	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kecamatan Pasirjambu	1 Dokumen	25.000.000	DAU	
2.2		7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang Dilaksanakan	Kecamatan Pasirjambu	100 %	346.499.000	DAU	
2.2.1		7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Kecamatan Pasirjambu	1 Dokumen	4.664.000	DAU	
2.2.2		7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Pasirjambu	3 Laporan	341.835.000	DAU	
3		7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang dibina	Kecamatan Pasirjambu	100 Persen	217.118.000	DAU	
3.1		7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Pasirjambu	100 Persen	108.228.000	DAU	
3.1.1		7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Pasirjambu	10 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000	DAU	
3.1.2		7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Pasirjambu	1 Laporan	103.228.000	DAU	
3.2		7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Terfasilitasi	Kecamatan Pasirjambu	100 Persen	58.890.000	DAU	
3.2.1		7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kecamatan Pasirjambu	10 Lembaga Kemasyarakatan	41.390.000	DAU	
3.2.2		7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Pasirjambu	1 Laporan	15.000.000	DAU	
3.2.3		7	01	03	2.03	0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kecamatan Pasirjambu	1 Laporan	2.500.000	DAU	
3.3		7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Fasilitasi dan Pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan Pasirjambu	100 Persen	50.000.000	DAU	

NO.	SASARAN	KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING
		Urusan/Unsur	Bidang Urusan/Bidang Unsur	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.3.1		7	01	03	2.06	0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Kecamatan Pasirjambu	Keluarga		DAU	
3.3.2		7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Kecamatan Pasirjambu	Keluarga		DAU	
3.3.3		7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kecamatan Pasirjambu	10 Keluarga	25.000.000	DAU	
3.3.4		7	01	03	2.06	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Kecamatan Pasirjambu	Keluarga		DAU	
3.3.5		7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kecamatan Pasirjambu	Keluarga		DAU	
3.3.6		7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yangBerkualitas dan Berdaya Saing	Kecamatan Pasirjambu	Keluarga		DAU	
3.3.7		7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kecamatan Pasirjambu	10 Keluarga	15.000.000	DAU	
3.3.8		7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kecamatan Pasirjambu	10 Keluarga	10.000.000	DAU	
3.3.9		7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kecamatan Pasirjambu	Keluarga		DAU	
3.3.1		7	01	03	2.06	0010	Pelatihan Keluarga	Jumlah Keluarga	Kecam	Keluar		DAU	

NO.	SASARAN	KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING
		Urusan/Unsur	Bidang Urusan/Bidang Unsur	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0							Tanggap Bencana Alam	yang Mengikuti PelatihanKeluarga Tanggap Bencana Alam	atan Pasirjambu	ga			
3.3.11		7	01	03	2.06	0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti PelatihanKeluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Kecamatan Pasirjambu	Keluarga		DAU	
3.3.12		7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan MenujuKeluarga Berkualitas	Kecamatan Pasirjambu	Keluarga		DAU	
4		7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Penegakan Perda yang Berkaitan dengan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Pasirjambu	100 Persen	50.000.000	DAU	
4.1		7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi dan Pembinaan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Pasirjambu	100 Persen	35.000.000	DAU	
4.1.1		7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Pasirjambu	1 Laporan	10.000.000	DAU	
4.1.2		7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Pasirjambu	1 Laporan	25.000.000	DAU	
4.2		7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Pasirjambu	100 Persen	15.000.000	DAU	
4.2.1		7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Pasirjambu	3 Laporan	15.000.000	DAU	
5		7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Pasirjambu	100 Persen	124.000.000	DAU	
5.1		7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Pasirjambu	100 Persen	124.000.000	DAU	
5.1.1		7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Pasirjambu	50 Orang	10.000.000	DAU	
5.1.2		7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan	Jumlah Orang yang	Kecam	100 Orang	60.000.000	DAU	

NO.	SASARAN	KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING
		Urusan/Unsur	Bidang Urusan/Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
							dan Kesatuan Bangsa	Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	atan Pasirjambu				
5.1.3		7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional	Kecamatan Pasirjambu	100 Orang	14.000.000	DAU	
5.1.4		7	01	05	2.01	0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Pasirjambu	1 Laporan	5.000.000	DAU	
5.1.5		7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Pasirjambu	1 Dokumen	35.000.000	DAU	
6		7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Desa	Kecamatan Pasirjambu	100 Persen	75.000.000	DAU	
6.1		7	01	06	2.01		Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Dibina dan Diawasi	Kecamatan Pasirjambu	100 Persen	75.000.000	DAU	
6.1.1		7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Pasirjambu	1 Dokumen	5.000.000	DAU	
6.1.2		7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Pasirjambu	10 Dokumen	25.000.000	DAU	
6.1.3		7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Pasirjambu	Dokumen		DAU	
6.1.4		7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Pasirjambu	10 Dokumen	45.000.000	DAU	

Pasirjambu, Juni 2025
CAMAT PASIRJAMBU,

NIA KANIA, S.PT., M.I.L
NIP. 19720927 201001 2 008

BAB V
PENUTUP

5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Perubahan Renja

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pasirjambu Tahun 2026 merupakan dokumen penyesuaian terhadap Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah atau instansi pemerintah yang dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi awal, seperti perubahan kebijakan, kondisi ekonomi, hasil evaluasi, atau kebutuhan mendesak lainnya, definisi lengkapnya adalah proses revisi terhadap dokumen Renja yang disusun untuk tahun berjalan, guna menyesuaikan dengan dinamika dan perkembangan aktual, baik internal maupun eksternal, sehingga program dan kegiatan tetap relevan, efektif, dan dapat dilaksanakan secara optimal Dokumen Perubahan Renja ini harus disusun oleh Kecamatan Pasirjambu dalam melaksanakan rangkaian proses perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Pasirjambu dalam melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan.

Renja Kecamatan Pasirjambu dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah mengacu pada perubahan RKPD. Selain itu, Renja dapat diubah jika terdapat keridaksesuaian sebagaimana hasil pengendalian dan evaluasi dan/atau terjadi penyesuaian tujuan dan sasaran Kecamatan Pasirjambu beserta target indikatornya sebagaimana tertuang didalam Renstra Kecamatan Pasirjambu Tahun 2026-2029.

5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Pasirjambu Tahun 2026 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2026-2029, Renstra Kecamatan Pasirjambu tahun 2026-2029, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Selain itu, Penyusunan Perubahan Renja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutkahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selain hal-hal diatas, Penyusunan PerubahanRenja merupakan salah satu upaya proses penajaman program, kegiatan dan pagu indikatif Kecamatan Pasirjambu yang ditetapkan pada Peraturan Bupati Bandung nomor 75 Tahun 2023 tentang RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2026.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Renja Kecamatan Pasirjambu Tahun 2026 merupakan pedoman untuk proses penganggaran pada tahap Rencana Kinerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah direncanakan.

Rencana Kerja Kecamatan Pasirjambu Tahun 2026 merupakan pedoman untuk proses Penyusunan Perubahan penganggaran pada tahap kebijakan umum Anggaran dan plafon dan prioritas anggaran sementara Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah direncanakan.

Demikian Dokumen Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pasirjambu Tahun Anggaran 2026 ini kami susun dan kami menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunannya, namun diharapkan dengan tersusunnya Rencana Kerja 2026 ini, Kecamatan Pasirjambu dapat meningkatkan pencapaian kinerja yang signifikan dalam melaksanakan seluruh sasaran strategisnya dalam upaya mencapai dan mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Pasirjambu yang selaras dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Bandung.

Pasirjambu, Juli 2025

CAMAT PASIRJAMBU,

ttd

NIA KANIA

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Lampiran – lampiran :

Formulir E.70
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perangkat Daerah
Kabupaten Bandung

No	Jenis kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembentukan Tim Penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusun Agenda Kerja	√			
2	Pengolahan Data dan Evaluasi	√			
3	Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	√			
4	Mengkaji hasil evalusi renja-Perangkat Daearah Kabupaten/Kota tahun lalu berdasarkan renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	√			
5	Penentuan isu-isu penting penyelenggaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	√			
6	Penelaahan Rancangan Akhir PerubahanRKPD Kabupaten/Kota	√			
7	Perumusan Tujuan dan sasaran	√			
8	Penelaahan usulan masyarakat	√			
9	Perumusan kegiatan prioritas	√			
10.	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	√			
10. a	Menyelarasakan program dan kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dengan usulan program dan kegiatan hasil musrembang kecamatan	√			
10. b	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	√			
10. c	Mensingkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam rangak optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan	√			
10. d	Mensesuaikan pendanan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat Daerah Kabupaten/Kota sesuai surat edaran bupati/wali kota	√			
11	Sasaran Program dan kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja,perencanaan dan penganggaran terpadu	√			

12	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dengan perangkat Daerah lainya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten/Kota				
13	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten/Kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju	√			
14	Dokumen renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang telah disahkan	√			

Pasirjambu, Juli 2025

CAMAT PASIRJAMBU,

NIA KANIA, S.PT., M.I.L

NIP. 19780927 201001 2 008